



Laporan *Triwulan I* **KINERJA** *Tahun 2023*

**Balai Riset Pemulihan
Sumber Daya Ikan**

LAPORAN KINERJA

BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN TRIWULAN I TAHUN 2023



PUSAT RISET PERIKANAN
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
2023

Tim Penyusun:

Penanggung jawab : Ir. Iswari Ratna Astuti

Ketua : Riswanto, S.Kel
Sekretaris : Dwi Cahya Kusuma, S.Si
Anggota : Hendra Saefulloh, S.Sos
Aulia Nurmaulidia Aspia Putri P.,S.T.

Kontributor : Sub Bagian Umum
Sub Koordinator Tata Operasional
Sub Koordinator Pelayanan Teknis

Sub Koordinator Tata Operasional Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan

Alamat:
Jl. Cilalawi No.1 Jatiluhur, Purwakarta
Jawa Barat, Indonesia
Telp/Fax. +62 264 208768
e-mail : to.jatiluhur2@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja (LKj) triwulan I Tahun 2023 dapat terselesaikan dengan baik. Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan (BRPSDI) dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai sebuah unit kerja eselon III.b di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan. Laporan Kinerja triwulan I Tahun 2023 telah disusun sesuai dengan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.

Dokumen LKj berisi laporan kegiatan BRPSDI selama periode triwulan I Tahun 2023, berikut informasi tentang pencapaian kinerja sesuai tugas dan fungsi instansi. Selanjutnya, laporan ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertanggungjawaban secara struktural kepada instansi di atasnya, serta diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi BRPSDI.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan LKj ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan. Harapan kami, laporan ini dapat merepresentasikan gambaran menyeluruh dari pelaksanaan semua kegiatan BRPSDI selama triwulan I Tahun 2023.

..

Purwakarta, 14 April 2023
Kepala Balai Riset Pemulihan
Sumber Daya Ikan



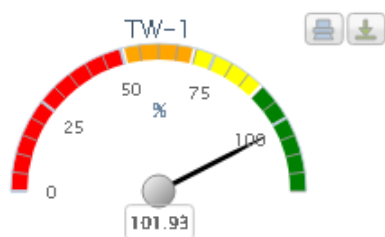
Ir. Iswari Ratna Astuti
NIP. 19691124 199503 2 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) BRPSDI Jatiluhur triwulan I Tahun 2023 merupakan capaian atas kinerja triwulan I Tahun 2023. Penilaian tingkat keberhasilan pencapaian sasaran kinerja BRPSDI Jatiluhur triwulan I Tahun 2023 dilakukan dengan pengukuran Balance Score Card (BSC) dengan sasaran dan indikator kinerja yang ditargetkan pada kegiatan BRPSDI Jatiluhur tahun 2023.

BRPSDI Jatiluhur di awal tahun 2023 telah menetapkan dokumen Penetapan Kinerja BRPSDI Jatiluhur tahun 2023, yang terdiri dari 1 Sasaran Kegiatan dan 11 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Jumlah Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tahun 2023 mendapatkan 1 Indikator Kinerja Baru yakni **IKK Nilai PNBP BRPSDI (Rupiah Miliar)**.

Pengukuran capaian kinerja BRPSDI Jatiluhur triwulan I Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja (Key Performance Indicator, disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis balanced scorecard (BSC) dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu melalui laman <http://kinerjaku.kkp.go.id>.



Capaian Kinerja IKU + IKM

TW1	TW2
101,93	0,00

Hasil pengukuran NPSS BRPSDI pada triwulan I Tahun 2023 berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang diinput ke dalam aplikasi KINERJAKU telah mencapai **101,93 %**, yang berasal dari capaian kinerja masing-masing IKK, diantaranya

Secara umum Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan merupakan Indikator Kinerja Manajerial (IKM). Dari 11 IKM yang disepakati, IK yang dapat diukur pada periode triwulan I yakni 4 (empat) IKM. Hasil validasi yang telah dilakukan, keempat IKM tersebut telah memenuhi target periodik yang telah disepakati dalam dokumen Rencana Aksi. Adapun IKK tersebut, antara lain:

- I. IKM Nilai PNBPN BRPSDI (Rupiah Miliar), memiliki target Tahunan 0,021 Miliar, target di periode triwulan I yakni 0,002 miliar. Nilai capaian PNBPN per triwulan I yakni 0,002 miliar;
- II. IKM Persentase unit kerja BRPSDI yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%), memiliki target 100, dan sudah tercapai dengan nilai capaian 100%;
- III. IKM Presentase rekomendasi hasil pengawasan BRPSDI yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%), memiliki target 75% setiap triwulannya, dan sudah tercapai dengan nilai 75%;
- IV. IKM Presentase dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya BRPSDI (%), memiliki target 100%, dan sudah tercapai dengan nilai 100%.

Gambaran lengkap capaian Indikator Kinerja Manajerial (IKM) BRPSDI selama triwulan I Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut

KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET	TRIWULAN I		NPSS
					TARGET	CAPAIAN	
1	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	1	Nilai PNBPN BRPSDI (Rupiah Miliar)	0,021	0.002	0.002	100.00
		2	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK BRPSDI dibandingkan Realisasi Anggaran BRPSDI 2022 (%)	≤0,5			
		3	Indeks Profesionalitas ASN BRPSDI (Indeks)	80			
		4	Nilai PM SAKIP BRPSDI (Nilai)	78			
		5	Nilai Rekonsiliasi Kinerja BRPSDI (Nilai)	92			

6	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar BRPSDI (%)	92	92	100	108,7
7	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan BRPSDI yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	75	75	75	100
8	Nilai IKPA BRPSDI (nilai)	89			
9	Nilai Kinerja Anggaran BRPSDI (nilai)	82			
10	Kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti lingkup BRPSDI (Kemitraan)	2			
11	Persentase dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya BRPSDI (%)	100	100	100	100.00

Secara Umum, Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) BRPSDI triwulan I Tahun 2023 yang telah diukur dapat dikategorikan baik. Nilai yang ditargetkan sudah berwarna Hijau. Pelaksanaan kegiatan BRPSDI dalam memenuhi atau mencapai target tidak selalu berjalan dengan lancar, dalam prakteknya ditemukan beberapa kendala maupun masalah baik teknis maupun non teknis.

Kendala dan permasalahan yang dihadapi selama proses pelaksanaan kegiatan yakni Pembatasan jenis layanan publik dan produk layanan publik (KepmenKP Nomor 54 Tahun 2022) terutama yang berkaitan dengan Jasa analisa laboratorium yang selama ini menjadi sumber pendapatan utama BRPSDI, keterbatasan aset yang dapat dikelola/manfaatkan untuk kerjasama pemanfaatan aset, dan penurunan jumlah SDM BRPSDI yang sangat signifikan.

Adapun tindak lanjut yang sudah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut ialah BRPSDI telah berkoordinasi dengan Pusat Riset Perikanan untuk mencari alternatif skema penerimaan PNBPN melalui jenis layanan publik lain, BRPSDI juga telah berkonsultasi dengan KPKNL Kab. Purwakarta untuk membantu mengidentifikasi peluang-peluang aset BRPSDI yang dapat



dimanfaatkan/disewakan/pinjam pakai/KSP/BGS sesuai dengan PMK 115 Tahun 2020. Dalam rangka pencapaian sasaran kinerja kendala berkurangnya SDM BRPSDI dampak kebijakan pengalihan fungsional peneliti dan teknisi ditindaklanjuti dengan *recruitment* pegawai melalui mekanisme *outsourcing* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	2
1.3 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	3
1.4 Keragaan Sumber Daya Manusia	5
1.5 Sistematika LKj	7
BAB I. PERENCANAAN KINERJA	8
2.1 Rencana Strategis	8
2.1.1 Visi	9
2.1.2 Misi	10
2.1.3 Tujuan	10
2.1.4 Sasaran Strategis	11
2.1.5 Potensi dan Permasalahan	15
2.1.5.1 Potensi	15
2.1.5.2 Permasalahan	17
2.2 Rencana Kinerja Tahaunan	19
2.3 Perjanjian Kinerja BRPSDI TA 2022	19
2.4 Pengukuran Kinerja	21
BAB I. AKUNTABILITAS KINERJA	23
3.1 Prestasi Kinerja Organisasi BRPSDI Tahun 2022	23
3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja	26
3.3 Akuntabilitas Keuangan	45
3.4 Efisiensi Sumber Daya	50
BAB I. PENUTUP	53
4.1 Kesimpulan	53
4.2 Permasalahan, Rekomendasi dan Tindak Lanjut	54
4.3 Saran	55

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Struktur Organisasi BRPSDI.....	5
Gambar 2.	Distribusi pegawai BRPSDI berdasarkan PNS dan Non PNS triwulan I Tahun 2023.	6
Gambar 3.	Komposisi pegawai BRPSDI berdasarkan jabatan fungsional triwulan I Tahun 2023	6
Gambar 4.	Struktur Organisasi Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan	16
Gambar 5.	Pencapaian NSS pada Dashboard Aplikasi Kinerja triwulan I Tahun 2022 per tanggal 10 April 2023 Sumber: (http://kinerjaku.kkp.go.id)	27
Gambar 6.	Realisasi Pendapatan Per Akun penerimaan per 31 Maret 2023 (Sumber: https://spanint.kemenkeu.go.id/)	33
Gambar 7.	Screenshot dokumen Perjanjian Kinerja yang sudah diupload pada laman Bitrix24 KKP Sumber: https://kinerjakkp.bitrix24.com/	36
Gambar 8.	Screenshot dokumen Manual IKU yang sudah diupload pada laman Bitrix24 KKP Sumber: https://kinerjakkp.bitrix24.com/	36
Gambar 9.	Screenshot dokumen Rencana Aksi yang sudah diupload pada laman Bitrix24 KKP Sumber: https://kinerjakkp.bitrix24.com/	37
Gambar 10.	Screenshot dokumen Laporan Kinerja yang sudah diupload pada laman Bitrix24 KKP Sumber: https://kinerjakkp.bitrix24.com/	37
Gambar 11.	Nilai Efisiensi BRPSDI pada aplikasi SMART DJA Kemenkeu per 11 April 2023 (sumber: https://monev.kemenkeu.go.id/).	51

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Keragaan sumber daya manusia di Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan triwulan I Tahun 2023	5
Tabel 2.	Keragaan sumber daya manusia BRPSDI 2023	17
Tabel 3.	Perjanjian Kinerja (TAPJA) BRPSDI Tahun 2022	19
Tabel 4.	Hasil Pengukuran Capaian kinerja BRPSDI triwulan I Tahun 2023 berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan	25
Tabel 5.	Capaian IKM.1 BRPSDI triwulan I Tahun 2023	27
Tabel 6.	Capaian IKM.2 BRPSDI triwulan I Tahun 2023	29
Tabel 7.	Capaian IKM.3 BRPSDI triwulan I Tahun 2023	31
Tabel 8.	Capaian IKM.4 BRPSDI triwulan I Tahun 2023	32
Tabel 9.	Capaian IKM.5 BRPSDI triwulan I Tahun 2023	33
Tabel 10.	Capaian IKM.6 BRPSDI triwulan I Tahun 2023	35
Tabel 11.	Hasil Perhitungan komponen pembentuk IKU Manajemen Terstandar.....	35
Tabel 12.	Perhitungan Capaian IKM Persentase unit kerja BRPSDI yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	37
Tabel 13.	Capaian IKM.7 BRPSDI triwulan I Tahun 2023	39
Tabel 14.	Capaian IKM.8 BRPSDI triwulan I Tahun 2023	41
Tabel 15.	Capaian IKM.9 BRPSDI triwulan I Tahun 2023	42
Tabel 16.	Capaian IKM.10 BRPSDI triwulan I Tahun 2023	43
Tabel 17.	Capaian IKM.11 BRPSDI triwulan I Tahun 2023	44
Tabel 18.	Hasil Perhitungan Capaian IKM Layanan Dukman Triwulan I Tahun 2023	45
Tabel 19.	Realisasi anggaran BRPSDI berdasarkan jenis belanja Tahun Anggaran 2023 per tanggal 31 Maret 2023 pada aplikasi SAKTI.....	46
Tabel 20.	Realisasi Anggaran BRPSDI per IKK Tahun 2023	47

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan (BRPSDI) merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan Eselon III.b di bidang riset pemulihan sumber daya ikan perairan tawar dan laut, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan yang menangani riset kelautan dan perikanan serta pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan. Dalam pelaksanaan tugasnya, BRPSDI berada dalam koordinasi dan supervisi dari Pusat Riset Perikanan (PUSRISKAN). Pusat Riset Perikanan merupakan salah satu unit organisasi eselon III di bawah Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang perikanan. BRPSDI dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.80/MEN/2020 yakni melaksanakan riset pemulihan sumber daya ikan perairan tawar dan laut.

Laporan Kinerja BRPSDI triwulan I Tahun 2023 dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian kinerjanya sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) tersebut dilakukan berdasarkan pada:

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- 4) Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- 5) Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 6) Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 7) Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 8) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- 9) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja Baru di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- 10) Keputusan Kepala BRSDM KP Nomor 581 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja di lingkungan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
- 11) Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 - 2024;
- 12) Rencana Strategis Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 - 2024;
- 13) Rencana Strategis BRPSDI Tahun 2020 – 2024, dan
- 14) Perjanjian Kinerja BRPSDI Tahun 2023.

Peraturan tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada perencanaan strategi yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

1.2 Tujuan

Laporan Kinerja ini bertujuan sebagai salah satu wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi BRPSDI dalam rangka mewujudkan *good*

governance, transparansi, dan akuntabilitas sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja unit organisasi di BRPSDI. Oleh karena itu, BRPSDI sebagai Instansi Pemerintah dan Penyelenggara Negara telah menetapkan target kinerja tahun 2023 dilanjutkan dengan melakukan monitoring dan pengukuran kinerja yang telah dicapai, kemudin dituangkan ke dalam susunan Laporan Kinerja (LKj) selama triwulan I Tahun 2023 sebagai wujud akuntabilitas dari mandat yang diemban. LKj BRPSDI disampaikan kepada Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan melalui Kepala Pusat Riset Perikanan.

1.3 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

BRPSDI dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.80/MEN/2020, tanggal 28 Desember 2020 yang mendapat persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dalam surat Nomor: B/1380/M.KT.01/2020, tanggal 2 Oktober 2020. BRPSDI mempunyai tugas melaksanakan riset pemulihan sumber daya ikan perairan tawar dan laut.

Secara kelembagaan, berdasarkan Pasal 3 PER.80/MEN/2020 terkait tugasnya Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) penyusunan, pemantauan, evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang riset pemulihan sumber daya ikan perairan tawar dan laut;
- 2) pelaksanaan riset pemulihan sumber daya ikan perairan tawar dan laut yang meliputi riset pemulihan sumber daya ikan, meliputi riset pemulihan sumber daya ikan, mencakup *restocking* sumber daya ikan, dan rehabilitasi/restorasi habitat;
- 3) pelayanan teknis, jasa, informasi, komunikasi dan kerja sama riset;
- 4) pengelolaan prasarana dan sarana riset; dan
- 5) pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Penyelenggaraan fungsi BRPSDI tersebut berkaitan dengan upaya pembangunan sektor perikanan dan kelautan secara berkelanjutan serta dapat memberikan peran nyata dalam menunjang pembangunan nasional perikanan di perairan umum tawar dan laut. Monitoring terhadap potensi, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan perairan tawar dan laut perlu dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pembangunan sektor perikanan dan kelautan secara berkelanjutan. Berdasarkan kegiatan monitoring tersebut akan diketahui status terkini perairan, sehingga bagi perairan yang mengalami kerusakan akibat eksploitasi sumber daya perairan yang berlebihan tanpa memperhitungkan daya dukung perairan perlu dilakukan penelitian dalam rangka pemulihan atau rehabilitasinya.

Keberadaan BRPSDI menjadi sangat strategis mengingat di Indonesia belum terdapat lembaga penelitian yang memiliki tugas pokok dan fungsi terkait dengan upaya pemulihan dan konservasi sumber daya ikan. Strategi pelaksanaan riset pemulihan sumber daya ikan dibagi menjadi empat tahapan, yaitu:

- 1) identifikasi, karakterisasi dan evaluasi sumber daya perikanan,
- 2) pemulihan sumber daya ikan,
- 3) monitoring dan evaluasi pemulihan sumber daya ikan, dan
- 4) perumusan kebijakan pemulihan sumber daya ikan.

Dukungan hasil penelitian bagi pengelolaan sumber daya ikan sangat diperlukan agar hasil yang akan dicapai dapat optimal dan berlandaskan kajian ilmiah.

Susunan organisasi dan tata kerja BRPSDI tercantum dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.80/MEN/2020, tanggal 28 Desember 2020 dipimpin oleh seorang Kepala dengan jabatan struktural eselon III.b. Susunan organisasi BRPSDI terdiri atas:

- 1) Subbagian Umum, yang mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapannya;
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional, yang saat ini terdiri atas jabatan fungsional peneliti, teknisi litkayasa, dan pustakawan.



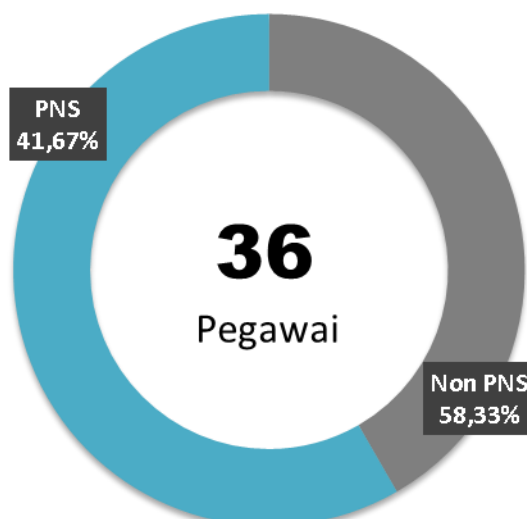
Gambar 1. Struktur Organisasi BRPSDI sesuai dengan PER.80/MEN/2020

1.4 Keragaan Sumber Daya Manusia

Kondisi sumber daya manusia di BRPSDI triwulan I Tahun 2023 adalah pegawai BRPSDI berjumlah 36 orang terdiri dari 15 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 21 pegawai kontrak dengan rasio 41,67% dan 58,33% (**Gambar 2**). Jumlah SDM yang terdapat di BRPSDI masih relatif ideal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi. Kondisi sumber daya manusia BRPSDI Tahun 2022 disajikan pada **Tabel 1**.

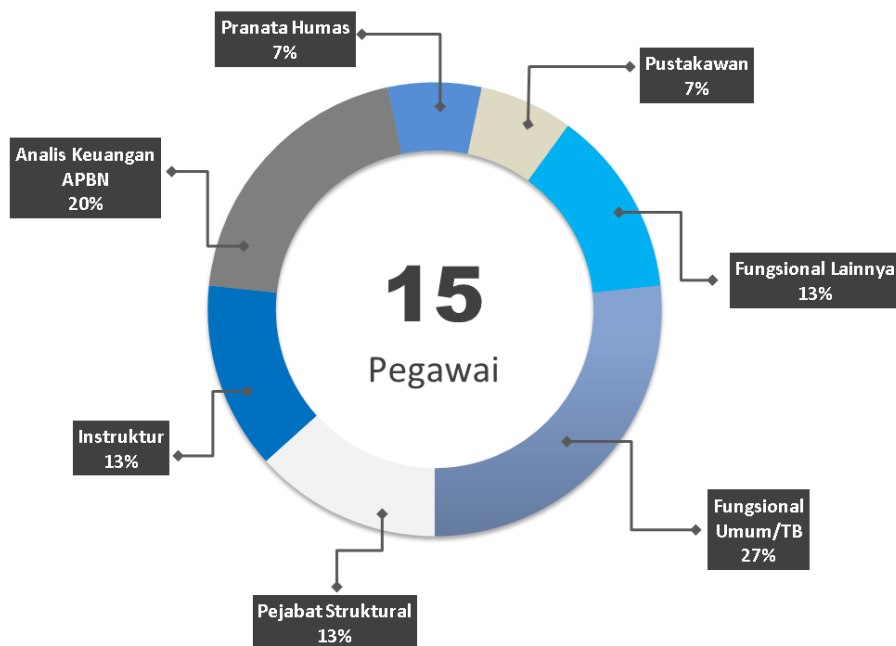
Tabel 1. Keragaan sumber daya manusia di Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan triwulan I Tahun 2023

No	Staf BRPSDI	Pegawai Negeri Sipil	Kontrak	Total
1	Struktural	2	-	2
2	Instruktur	2	-	2
3	Analisis APBN	3	-	3
4	Pranata Humas	1	-	1
5	Pustakawan	1	-	1
6	Fungsional Lainnya	2	0	2
7	Tugas Belajar	4	-	4
8	Pramubakti	-	14	14
9	Pengemudi	-	3	3
10	Satpam	-	4	4
Jumlah		15	21	36



Gambar 2. Distribusi pegawai BRPSDI berdasarkan PNS dan non PNS triwulan I Tahun 2023.

Peta sebaran fungsional dan non fungsional BRPSDI terdiri dari Instruktur (2 orang), Analis Keuangan APBN (3 orang), fungsional Pustakawan (1 orang), Pranata Humas (1 orang), fungsional umum/Tugas belajar (4 orang), fungsional lainnya (2 orang) dan pejabat struktural (2 orang). Persentase pegawai non fungsional (fungsional lainnya) tersebut merupakan staf pelaksana di BRPSDI dan beberapa fungsional non kelas (**Gambar 3**).



Gambar 3. Komposisi pegawai BRPSDI berdasarkan jabatan fungsional triwulan I Tahun 2023

1.5 Sistematika Laporan Kinerja Pemerintah

Laporan Kinerja (LKj) BRPSDI triwulan I Tahun Anggaran 2023 bertujuan untuk menginformasikan capaian kinerja selama periode Tahun Anggaran 2023 yang telah dilaksanakan dan sebagai pertanggungjawaban Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sistematika penyajian Laporan Kinerja ini meliputi:

1. **Ringkasan Eksekutif**, menyajikan uraian singkat tentang tujuan, sasaran dan capaian kinerja Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan triwulan I Tahun 2023.
2. **Bab I Pendahuluan**, menyajikan gambaran umum dan uraian mengenai tugas dan fungsi Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan.
3. **Bab II Perencanaan Kinerja**, bab ini menyajikan perencanaan dan Perjanjian kinerja Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan pada triwulan I Tahun 2023.
4. **Bab III Akuntabilitas Kinerja, Akuntabilitas Keuangan dan Efisiensi Sumber Daya**, bab ini menyajikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi kinerja dan analisis akuntabilitas kinerja dan keuangan berdasarkan Perjanjian kinerja yang telah ditetapkan pada triwulan I Tahun 2023.
5. **Bab IV Penutup**, bab ini menyajikan simpulan terhadap pencapaian kinerja triwulan I Tahun 2023.
6. **Lampiran**
 - Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023;
 - Surat Keputusan Kepala Balai tentang Tim Penyusun Laporan Kinerja.

II. PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Sumber daya ikan merupakan salah satu sumber utama pangan, penyedia lapangan kerja dan pemberi manfaat ekonomi bagi mereka yang terlibat dalam kegiatan tersebut, sehingga perikanan mempunyai arti penting sosial dan ekonomi yang sangat besar. Sampai saat ini, sebagian besar kebutuhan produk perikanan Indonesia masih dipenuhi dari kegiatan perikanan.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengembangan perikanan yang dinamis dan meningkatnya permintaan dunia akan produk perikanan telah meningkatkan eksploitasi sumber daya secara intensif. Hal ini mengakibatkan sebagian besar dari stok ikan dieksploitasi secara penuh, bahkan diusahakan secara berlebihan. Selain itu, masalah degradasi lingkungan semakin meningkatkan laju penurunan sumber daya hayati perikanan di kawasan perairan umum daratan dan pesisir laut. Dampak dari kondisi tersebut sumber daya ikan mengalami penurunan baik stok ikan maupun kualitas habitatnya sehingga memerlukan pemulihan.

Status sumber daya ikan yang rusak tersebut merupakan salah satu akibat dari kegagalan dalam pengaturan perikanan menuju tercapainya pengelolaan perikanan yang lestari dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, peranan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka pemulihan sumber daya ikan yang mencakup pemacuan dan restocking sumber daya ikan (*fish stock enhancement*) dan rehabilitasi/restorasi habitat perairan akan sangat besar artinya bagi pemulihan sumber daya ikan serta pelaksanaan pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab.

Penyediaan data dan informasi serta teknologi mengenai pemulihan sumber daya ikan akan terpenuhi dan lebih terkoordinir jika ditangani oleh suatu lembaga riset yang mempunyai mandat untuk melaksanakan riset di bidang pemulihan sumber daya ikan. Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan merupakan institusi

riset yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 80/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan (BRPSDI) dan mempunyai mandat melaksanakan riset di bidang pemulihan sumber daya ikan perairan tawar dan laut di tingkat nasional.

Keberadaan BRPSDI menjadi sangat strategis mengingat di Indonesia belum terdapat lembaga riset yang memiliki tugas pokok dan fungsi terkait dengan upaya pemulihan sumber daya ikan. Strategi pelaksanaan riset pemulihan sumber daya ikan dibagi menjadi empat tahapan, yaitu:

1. identifikasi, karakterisasi dan evaluasi sumber daya ikan,
2. pemulihan sumber daya ikan,
3. monitoring dan evaluasi pemulihan sumber daya ikan, dan
4. perumusan kebijakan pemulihan sumber daya ikan.

Dukungan hasil riset bagi pengelolaan sumber daya ikan sangat diperlukan agar hasil yang akan dicapai dapat optimal dan berlandaskan kajian ilmiah.

Rencana Strategis Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan (Renstra BRPSDI) Tahun 2020–2024 tersebut disusun sebagai perubahan atas Rencana Strategis Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan Tahun 2020-2024 sebagai tindak lanjut dari penataan kelembagaan di lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM). Renstra BRPSDI Tahun 2020–2024 sebagai pelaksanaan program kegiatan riset pemulihan sumber daya ikan perairan tawar dan laut merupakan acuan untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan serta mendukung Renstra Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan yang memiliki peran strategis dalam mendukung visi KKP melalui kegiatan riset dan pengembangan SDM KP.

2.1.1. Visi

Visi KKP adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”. Implementasi dari visi dan misi Presiden

dilakukan secara bertanggung jawab berlandaskan gotong royong, sehingga saling memperkuat, memberi manfaat dan menghasilkan nilai tambah ekonomi, sosial dan budaya bagi kepentingan bersama.

Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis eselon III.b yang mempunyai tugas melaksanakan riset pemulihan sumber daya ikan perairan tawar dan laut. Dalam menjalankan tugasnya, BRPSDI berpedoman pada visi sebagai berikut:

" Menjadi lembaga riset yang menyediakan IPTEK pemulihan sumber daya ikan untuk mendukung pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan "

2.1.2. Misi

Misi Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan adalah turunan dari misi Presiden dan KKP dalam bidang riset kelautan dan perikanan. Dari 9 (sembilan) misi Presiden, Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan mendukung 3 (tiga) misi yaitu:

1. Misi ke-2 yakni Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing melalui peningkatan kontribusi riset dan inovasi iptek perikanan terhadap perekonomian masyarakat KP
2. Misi ke-4 yakni Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan.
3. Misi ke-8 yakni Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya melalui peningkatan tata kelola pemerintahan di KKP.

2.1.3. Tujuan

" Meningkatkan kapasitas kelembagaan, SDM aparatur, hasil riset dan inovasi IPTEK pemulihan sumber daya ikan untuk mendukung program pembangunan kelautan dan perikanan nasional.."

Tujuan BRPSDI mencerminkan arah pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan serta penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Litbangrap

IPTEK) 5 (lima) tahun kedepan dalam rangka menunjang tercapainya tujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Penjabaran Tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemanfaatan inovasi teknologi mendukung industrialisasi KP yang berdaya saing.
2. Menghasilkan dan mengembangkan riset perikanan dan inovasi mendukung pembangunan berkelanjutan.
3. Menyelenggarakan fungsi kelembagaan dan manajerial riset dan SDM sesuai tata kelola pemerintahan yang baik.

Sesuai tugas dan fungsi Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan, secara umum fungsi BRPSDI meliputi:

- 1) Penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta laporan;
- 2) Pelaksanaan penelitian pemulihan sumber daya ikan perairan tawar dan laut yang meliputi penelitian pemulihan sumber daya ikan, mencakup restocking sumber daya ikan, dan rehabilitasi/restorasi habitat;
- 3) Pelayanan teknis, jasa informasi, komunikasi dan pengelolaan kerja sama penelitian pemulihan sumber daya ikan perairan tawar dan laut;
- 4) Pengelolaan sarana dan sarana penelitian, dan;
- 5) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Kegiatan riset pemulihan sumber daya ikan direncanakan dan diarahkan untuk menghasilkan informasi dan teknologi yang mendukung pembangunan sektor perikanan khususnya subsektor perikanan tangkap yang tangguh baik di perairan tawar maupun laut. Berdasarkan mandat dan tupoksi, tujuan dan sasaran BRPSDI ditetapkan berdasarkan output kegiatan yang tertuang dalam kertas kerja RKA-K/L.

2.1.4 Sasaran Strategis

Sasaran strategis (SS) merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh KKP sebagai suatu outcome/impact dari beberapa program yang dilaksanakan. Sasaran Strategis KKP adalah sebagai berikut:

SS-1 Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat

- SS-2 Ekonomi sektor KP meningkat
- SS-3 Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan
- SS-4 Kapasitas dan kompetensi SDM KP meningkat
- SS-5 Hasil riset dan inovasi dimanfaatkan
- SS-6 Tatakelola SDKP bertanggung jawab
- SS-7 Industrialisasi KP berdaya saing
- SS-8 Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan Integratif
- SS-9 Tata kelola pemerintahan yang baik**

Dengan memperhatikan misi dan tujuan Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan tahun 2020-2024, maka sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2023 mengacu pada sasaran strategis KKP dan BRSDM KP yang pada unit eselon III disebut sebagai sasaran kegiatan adalah:

“SK.1 Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker”

Seiring dengan dinamika kebijakan yang terjadi selama pelaksanaan kegiatan dan anggaran selama Tahun 2023, KKP khususnya BRSDM KP mengalami perubahan. Perubahan kebijakan tersebut berkaitan dengan adanya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja Baru di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. KepMenKP tersebut memuat beberapa konsep dasar yang bertujuan untuk menyederhanakan/merubah pola struktur organisasi lama (Koordinator/Sub Koordinator menjadi Tim Kelompok Kerja) sebagai bagian dari transformasi Reformasi Birokrasi.

KepMenKP tersebut juga merubah konsep dasar penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Adapun perubahan-perubahan tersebut antara lain:

1. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) terbagi menjadi dua karakteristik, yakni Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Manajerial (IKM);
2. Konsep pengklasifikasian Tingkat Validitas IKU disederhanakan menjadi 3 (tiga) kategori, yakni Outcome, Output Kendali Rendah dan Output Kendali Tinggi;

3. Metode Cascading Indikator Kinerja (IK) disederhanakan menjadi 4 (empat) ruang lingkup, yakni Adopsi langsung, Komponen Pembentuk, Lingkup Dipersempit dan Buat Baru.

Perubahan konsep dan karakteristik tersebut mempengaruhi mekanisme perencanaan BRPSDI, sehingga perlu dilakukan penyesuaian kembali terkait dengan Kerangka Perencanaan, terutama menyesuaikan Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja (IK) sesuai dengan KepMenKP Nomor 43 Tahun 2023.

Tahun 2023, Sasaran Kegiatan BRPSDI ***“Tersedianya Data, Informasi dan Rekomendasi Kebijakan Hasil Riset Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan”*** dihapus, karena SK tersebut menjabarkan kegiatan sesuai tugas dan fungsi (riset), sedangkan tugas tersebut sudah dialihkan ke BRIN. Perubahan nomenklatur Sasaran Kegiatan (SK) dari ***“Tata Kelola Pemerintah yang baik lingkup Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan”*** menjadi ***“Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker”***.

Selain perubahan Sasaran Kegiatan, terdapat perubahan pola pengelompokan indikator kinerja di lingkup BRSDM KP, khususnya BRPSDI. Jika pada Tahun 2022 seluruh indikator kinerja merupakan indikator kinerja utama (IKU), di Tahun 2023 indikator kinerja dikelompokkan berdasarkan tugas atau *core business process* (IKU) dan kegiatan dukungan manajerial (IKM). Untuk satker eks riset lingkup BRSDM KP, sebagian besar tidak memiliki indikator kinerja utama (IKU), dikarenakan indikator kinerja yang berkaitan dengan tugas sudah diblokir. Sehingga indikator kinerja yang melekat pada satker eks riset hanya Indikator Kinerja Manajerial (IKM). Adapun IKK yang dicascadingkan dari Pusat Riset Perikanan kepada BRPSDI Jatiluhur, antara lain:

1. Penambahan IKK baru yakni ***“Nilai PNBP BRPSDI (Rupiah Miliar), Nilai PM SAKIP BRPSDI (Nilai), dan Persentase Rekomendasi hasil pengawasan BRPSDI yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)”***;
2. Penyesuaian Nomenklatur IKU ***“Jejaring dan/atau kerjasama BRPSDI yang disepakati/ditindaklanjuti (Kesepakatan)”*** menjadi IKK ***“Kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti lingkup BRPSDI (Kemitraan)”***;

3. Penghapusan IKK "*Bahan sintesa untuk rekomendasi potensi Pemulihan Sumber Daya Perikanan yang terpetakan dan berkelanjutan pada 11 WPP (kajian)*", dan "*Karya tulis ilmiah riset BRPSDI yang dipublikasikan (dokumen)*".

Dalam penyusunan Rencana Strategis, Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan menggunakan satu perspektif, yaitu perspektif *learning and growth*. Peta strategi BRPSDI memetakan setiap Sasaran Kegiatan (SK) yang disusun dalam rangka pencapaian tujuan organisasi sesuai visi dan misi yang diemban. Secara keseluruhan sasaran kegiatan BRPSDI berdasarkan tujuan yang akan dicapai.

Perspektif Learning and Growth (input)

Sasaran Kegiatan (SK-1) yang akan dicapai adalah "**Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker**". Indikator Kinerja yang mendukung SK ini antara lain:

- I. IKM-1, Nilai PNBK BRPSDI (Rupiah Miliar) ditargetkan 0,021 miliar rupiah tahun 2023. IK ini merupakan IKK Baru yang diturunkan ke BRPSDI;
- II. IKM-2, Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK BRPSDI dibandingkan Realisasi Anggaran BRPSDI 2022 (%) ditargetkan $\leq 0,5$ % setiap Tahunnya;
- III. IKM-3, Indeks Profesionalitas ASN BRPSDI selama periode 2023-2024 ditargetkan sebesar 80 setiap tahunnya;
- IV. IKM-4, Nilai PM SAKIP BRPSDI (Nilai) ditargetkan dengan nilai 78 Tahun 2023. IK ini merupakan IKK Baru yang diturunkan ke BRPSDI;
- V. IKM-5, Nilai Rekonsiliasi Kinerja BRPSDI, merupakan IKK baru yang ditargetkan sebesar 92, dan akan ditargetkan sebesar 92 setiap Tahunnya selama periode 2023-2024;
- VI. IKM-6, Presentase Unit kerja BRPSDI yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar selama periode 2023-2024 ditargetkan sebesar 92 % setiap Tahunnya;
- VII. IKM-7, Persentase Rekomendasi hasil pengawasan BRPSDI yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%), ditargetkan 75 % pada Tahun 2023, IK ini merupakan IKK Baru yang diturunkan ke BRPSDI;

- VIII. IKM-8, Nilai IKPA BRPSDI selama periode 2023-2024 ditargetkan sebesar 89 setiap Tahunnya;
- IX. IKM-9, Nilai NKA BRPSDI selama periode 2023-2024 ditargetkan sebesar 82 setiap Tahunnya;
- X. IKM-10, Kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti lingkup BRPSDI (Kemitraan), ditargetkan 2 kemitraan pada Tahun 2023. IK ini merupakan IKK yang mengalami penyesuaian nomenklatur dari IKU “Jejaring dan/atau kerjasama BRPSDI yang disepakati dan / atau ditindaklanjuti (kesepakatan)”;
- XI. IKM-11, Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya BRPSDI (%), akan ditargetkan sebesar 100% setiap Tahunnya selama periode 2023-2024;

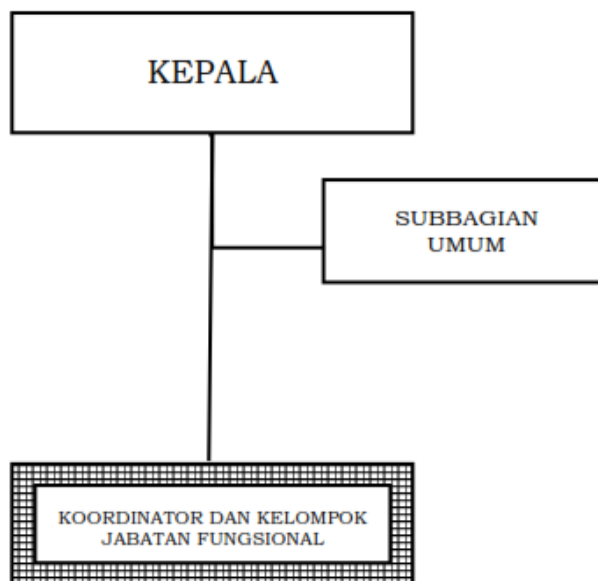
2.1.5 Potensi dan Permasalahan

2.1.5.1 Potensi

1. Organisasi

Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan (BRPSDI) merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan di bidang riset pemulihan sumber daya ikan perairan tawar dan laut. Dengan program riset pada Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan (BRPSDI) diharapkan mampu mengatasi masalah dan menjawab kendala mengenai degradasi sumber daya ikan yang ada secara efektif dan efisien, sehingga mampu memprediksi, mencegah, dan mengatasi berbagai permasalahan kerusakan sumber daya ikan secara cepat, tepat dan berkelanjutan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BRPSDI didukung oleh sumber daya manusia, sumber daya finansial, dan sumber daya fisik.

Struktur organisasi Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan meliputi: 1) Kepala Balai; 2) Kepala Sub Bagian Umum; 3) Kelompok Jabatan Fungsional. Struktur organisasi Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan disajikan dalam Gambar 4.



Gambar 4. Struktur Organisasi Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan

2. Sumber daya

a. Sumber daya manusia

Sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu faktor yang sangat penting dari sebuah organisasi yang merupakan kunci yang menentukan perkembangan organisasi. Pada hakikatnya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi. Keberadaan SDM memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian pembangunan kelautan dan perikanan secara keseluruhan yang dilaksanakan melalui kegiatan riset perikanan.

SDM pada Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) pegawai negeri sipil/PNS dan non ASN /tenaga kontrak. Pada tahun 2023, Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan memiliki SDM BRPSDI mempunyai pegawai negeri sipil (PNS) sebanyak 15 orang yang dibantu oleh pegawai dengan perjanjian kerja kontrak atau pegawai pemerintah non pegawai negeri (PPNP) sebanyak 21 orang (**Tabel 2**).

Tabel 2. Keragaan sumber daya manusia BRPSDI 2023

No	Staf BRPSDI	Pegawai Negeri Sipil	Kontrak	Total
1	Struktural	2	-	2
2	Instruktur	2	-	2
3	Analisis APBN	3	-	3
4	Pranata Humas	1	-	1
5	Pustakawan	1	-	1
6	Fungsional Lainnya	2	0	2
7	Tugas Belajar	4	-	4
8	Pramubakti	-	14	14
9	Pengemudi	-	3	3
10	Satpam	-	4	4
Jumlah		15	21	36

b. Sumber daya sarana-prasarana

Aset Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan meliputi aset berwujud. Aset berwujud terkait pelaksanaan fungsi riset maupun pengembangan SDM diantaranya sarana laboratorium yang tersebar di unit kerja untuk menghasilkan data dan informasi yang akurat tentang obyek riset dan pengembangan KP. Aset Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan tahun 2023, diantaranya

- Laboratorium Pengujian BRPSDI yang terdiri atas Laboratorium Kimia Air, Laboratorium Biologi Ikan, Laboratorium Plankton dan Larva, Laboratorium Bentos dan Laboratorium Genetik.
- Gedung Kantor seluas: 1.058 m² dengan No. IMB: 503/IMB.410-DTRB/2004, tgl. 17 September 2004 yang terdapat di sekitar kawasan Waduk Ir. H. Djuanda;
- Luas Tanah 3.988 m² yang berlokasi di kawasan Munjul, Purwakarta yang dipergunakan untuk rumah dinas;
- Beberapa sarana dan prasarana lainnya seperti guest house, perpustakaan, peralatan laboratorium dan survei lapangan serta kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat.

2.1.5.2 Permasalahan

Permasalahan utama dalam bidang pemulihan sumber daya ikan adalah kompleksnya penyebab penurunan sumber daya ikan akibat tangkap

lebih dan kerusakan atau penurunan kualitas habitat perairan akibat pencemaran atau dampak aktifitas antropogenik lainnya disamping penyebab alami seperti suksesi ekologi, perubahan iklim dan bencana alam. Pemulihan sumber daya ikan membutuhkan latar belakang data dan informasi serta model restocking dan rehabilitasi/restorasi yang relevan sehingga upaya pemulihan yang dilakukan dapat berjalan efektif, efisien serta optimal. Oleh karena itu, pelaksanaan riset pemulihan sumber daya ikan menjadi penting dalam rangka mendukung salah satu misi KKP yaitu “Keberlanjutan” karena sumber daya ikan yang pulih artinya dapat dimanfaatkan secara lestari dan berkelanjutan mengingat sifatnya yang dapat diperbarui.

Upaya pelaksanaan riset pemulihan sumber daya ikan tentu tidak terlepas dari berbagai permasalahan. Masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program riset di BRPSDI yang teridentifikasi antara lain:

1. Kompleksnya permasalahan riset pemulihan sumber daya ikan menyebabkan beberapa pelaksanaan riset untuk mencapai output sering bersifat tahun jamak (multiyears), namun dengan adanya pembatasan ruang lingkup dan justifikasi yang tepat diharapkan output riset dapat dihasilkan dengan tepat.
2. Riset pemulihan sumber daya ikan membutuhkan anggaran yang relatif cukup besar untuk mendukung riset yang bersifat fisik.
3. Keterbatasan anggaran riset menyebabkan riset yang dilaksanakan di BRPSDI terbatas pada topik dan tema pemulihan sumber daya ikan tertentu, namun diharapkan outputnya dapat menjadi model untuk diterapkan oleh stakeholder dan menjadi bahan dukungan bagi PUSRISKAN untuk menentukan rekomendasi kebijakan riset pemulihan sumber daya ikan.
4. Keterbatasan sumber dana dan peralatan laboratorium serta belum terakreditasinya semua laboratorium untuk pelaksanaan kegiatan riset sehingga perlu penetapan skala prioritas dan metode untuk menetapkan kegiatan-kegiatan riset.
5. Keterbatasan kualitas dan jumlah SDM merupakan salah satu kelemahan yang dapat menghambat kecepatan dalam menghasilkan output BRPSDI.

6. Jejaring kerja BRPSDI dengan institusi lain belum kuat, sehingga masih diperlukan upaya peningkatan koordinasi dan pembinaan kerjasama yang konsisten dan saling menguntungkan.

2.3 Rencana Kinerja Tahunan BRPSDI

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi, Misi dan Sasaran Kegiatan, BRPSDI mendapat alokasi anggaran sebesar **Rp 7.342.015.000,-**. Sesuai dengan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2023 Nomor: SP DIPA- 032.12.2.403824/2023 Tahun Anggaran 2023 yang telah disahkan pada tanggal 30 November 2022. Anggaran BRPSDI dialokasikan untuk memenuhi 3 (tiga) Kerangka Output (KRO), yakni:

- a. Layanan Dukungan Manajemen Internal sebesar Rp. 7.258.760.000,-;
- b. Layanan Manajemen SDM Internal sebesar Rp. 15.160.000,-;
- c. Layanan Manajemen Kinerja Internal sebesar Rp. 68.095.000,-.

2.4 Perjanjian Kinerja BRPSDI TA 2023

Dalam mencapai sasaran, BRPSDI telah disusun suatu Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2023 yang tertuang dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT). Perjanjian Kinerja tahunan terdiri atas indikator kinerja kegiatan dan rencana tingkat capaian (target), serta uraian output kegiatan. Perjanjian Kinerja Tahunan BRPSDI didasarkan pada perjanjian kinerja BRSDM KP secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada.

Tabel 3. Perjanjian Kinerja (PK) BRPSDI Tahun 2023

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	1	Nilai PNBP BRPSDI (Rupiah Miliar)	0,021
		2	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK BRPSDI dibandingkan Realisasi Anggaran BRPSDI 2022 (%)	≤0,5

3	Indeks Profesionalitas ASN BRPSDI (Indeks)	80
4	Nilai PM SAKIP BRPSDI (Nilai)	78
5	Nilai Rekonsiliasi Kinerja BRPSDI (Nilai)	92
6	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar BRPSDI (%)	92
7	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan BRPSDI yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	75
8	Nilai IKPA BRPSDI (nilai)	89
9	Nilai Kinerja Anggaran BRPSDI (nilai)	82
10	Kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti lingkup BRPSDI (Kemitraan)	2
11	Persentase dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya BRPSDI (%)	100

Perjanjian Kinerja BRPSDI tahun 2023 merupakan bentuk komitmen yang disepakati oleh Kepala BRPSDI dengan Kepala Pusat Riset Perikanan. Perjanjian kinerja ini memuat Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan Target IKK. Dalam rangka mencapai target IKK tersebut, dialokasikan anggaran kegiatan yang tertuang dalam dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) RKA-K/L BRPSDI tahun 2023. Pada awal tahun anggaran 2023 alokasi anggaran dalam DIPA BRPSDI adalah sebesar Rp. 7.342.015.000,- yang bersumber dari APBN rupiah murni. Setiap komponen dan sub komponen kegiatan dalam RKA-K/L disusun sesuai Rencana Kerja dan Bagan Akun Standar agar dapat mendukung pencapaian IKK yang terdapat dalam dokumen Perjanjian Kinerja 2023.

2.5 Pengukuran Kinerja

1. Rumus Pengukuran

Pengukuran capaian kinerja BRPSDI Tahun 2023, dilakukan dengan membandingkan antara data target dan realisasi IKU, akan diperoleh indeks capaian IKU. Penghitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku yaitu maximize, minimize, dan stabilize. Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah:

Warna	Keterangan
Sangat Baik	110-120 + Ide Baru
Baik	90-120
Cukup	70 - <90
Kurang	50 - <70
Sangat Kurang	<=50

Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengacu kepada Manual IKU pada masing-masing Indikator yang ada dalam dokumen *Balanced Scores Card* (BSC)

2. Metode Pengukuran Kinerja

Metode pengukuran kinerja BRPSDI dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali (triwulanan), yaitu pada bulan Maret (B03), Juni (B06), September (B09) dan Desember (B12). Selaku pihak yang bertanggungjawab dalam pengukuran, telah ditugaskan kepada penyusunan Laporan Kinerja BRPSDI yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala BRPSDI Nomor: 22/BRSDM-BRPSDI/OT.210/I/2023 tentang tentang Tim Penyusun Laporan Kinerja Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan tahun 2022 dan TIM Penyusun Laporan Triwulan Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan tahun 2023.

Keanggotaan Tim SAKIP dan Laporan Kinerja terdiri dari Kepala Balai selaku Penanggung Jawab, Koordinator Tata Operasional sebagai Ketua, Sekretaris, Anggota dan Kontributor. Dalam pelaksanaannya, capaian kinerja triwulanan dipantau langsung oleh Kepala Balai selaku Penanggung Jawab dan Koordinator Tata Operasional sebagai Ketua Tim Laporan Kinerja, selanjutnya penanggung



jawab kegiatan melaporkannya kepada Kepala Pusat Riset Perikanan dengan tembusan kepada Sekretaris BRSDM.

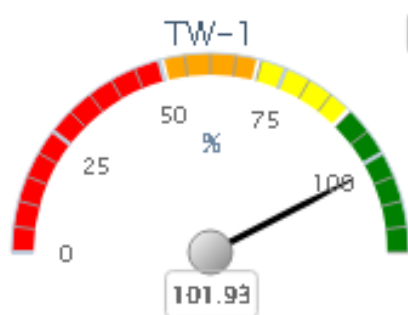


III. AKUNTABILITAS KINERJA

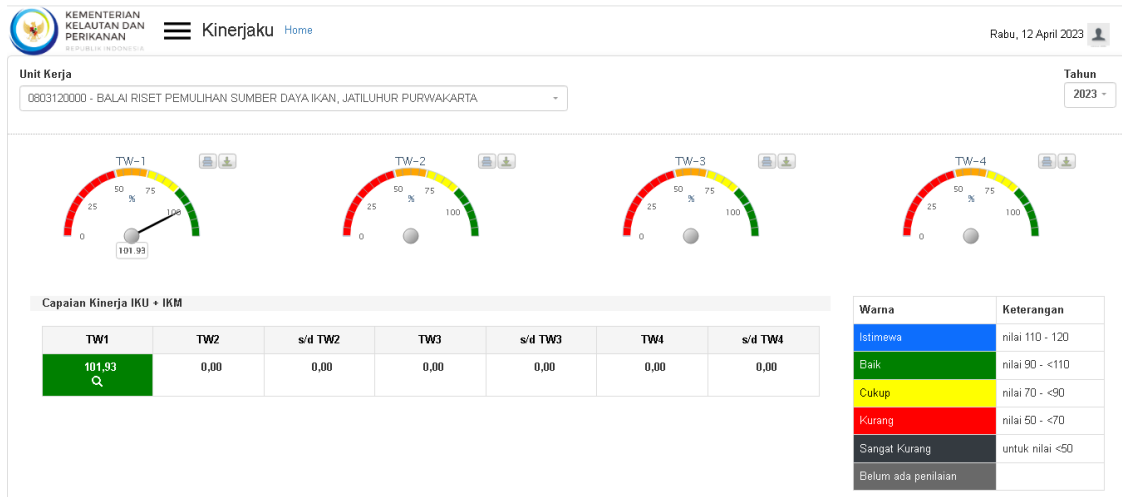
3.1 Prestasi Kinerja Organisasi BRPSDI Tahun 2023

Pengukuran kinerja digunakan sebagai alat dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja (IK) yang telah diidentifikasi agar sasaran dan tujuan kegiatan pada peta strategi yang dituangkan pada Perjanjian kinerja BRPSDI tahun 2023 dapat tercapai.

Evaluasi dan analisis kinerja yang dibahas dalam LKj BRPSDI triwulan I Tahun 2023 dilakukan berdasarkan dokumen PK BRPSDI Tahun 2023. Pencapaian kinerja berdasarkan dokumen PK BRPSDI telah diinput ke dalam aplikasi KINERJAKU. Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) adalah nilai yang menunjukkan konsolidasi dari seluruh IKK di dalam satu Sasaran Kegiatan (SK). Status capaian SK yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau (buruk/sedang/baik) ditentukan oleh NPSS. Nilai NPSS ini diperoleh berdasarkan hasil perhitungan menggunakan aplikasi Kinerjaku (<http://kinerjaku.kkp.go.id>).



NPSS BRPSDI pada triwulan I Tahun 2023 berdasarkan dokumen PK Tahun 2023 yang diinput ke dalam aplikasi KINERJAKU telah mencapai **101,93 %** yang berasal dari capaian kinerja masing-masing IKU



Gambar 5. Pencapaian NSS pada Dashboard Aplikasi Kinerjaku triwulan I Tahun 2023 per tanggal 10 April 2023 Sumber: (<http://kinerjaku.kkp.go.id>).

Secara umum Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan merupakan Indikator Kinerja Manajerial (IKM). Dari 11 IKM yang disepakati, IK yang dapat diukur pada periode triwulan I yakni 4 (empat) IKM. Hasil validasi yang telah dilakukan, keempat IKM tersebut telah memenuhi target periodik yang telah disepakati dalam dokumen Rencana Aksi. Adapun IKK tersebut, antara lain:

- I. IKM Nilai PNBP BRPSDI (Rupiah Miliar), memiliki target Tahunan 0,021 Miliar, target di periode triwulan I yakni 0,002 miliar. Nilai capaian PNBP per triwulan I yakni 0,002 miliar;
- II. IKM Persentase unit kerja BRPSDI yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%), memiliki target 100, dan sudah tercapai dengan nilai capaian 100%;
- III. IKM Presentase rekomendasi hasil pengawasan BRPSDI yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%), memiliki target 75% setiap triwulannya, dan sudah tercapai dengan nilai 75%;
- IV. IKM Presentase dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya BRPSDI (%), memiliki target 100%, dan sudah tercapai dengan nilai 100%.

Gambaran lengkap capaian Indikator Kinerja Manajerial (IKM) BRPSDI selama triwulan I Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut (**Tabel 4.**).

Tabel 4. Hasil Pengukuran Capaian kinerja BRPSDI triwulan I Tahun 2023 berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan

KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	TRIWULAN I		NPSS
			TARGET	CAPAIAN	
1 Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	1 Nilai PNBP BRPSDI (Rupiah Miliar)	0,021	0.002	0.002	100.00
	2 Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK BRPSDI dibandingkan Realisasi Anggaran BRPSDI 2022 (%)	≤0,5			
	3 Indeks Profesionalitas ASN BRPSDI (Indeks)	80			
	4 Nilai PM SAKIP BRPSDI (Nilai)	78			
	5 Nilai Rekonsiliasi Kinerja BRPSDI (Nilai)	92			
	6 Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar BRPSDI (%)	92	92	100	108,7
	7 Persentase Rekomendasi hasil pengawasan BRPSDI yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	75	75	75	100
	8 Nilai IKPA BRPSDI (nilai)	89			
	9 Nilai Kinerja Anggaran BRPSDI (nilai)	82			
	10 Kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti lingkup BRPSDI (Kemitraan)	2			
	11 Persentase dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya BRPSDI (%)	100	100	100	100.00

Secara Umum, Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) BRPSDI triwulan I Tahun 2023 yang telah diukur dapat dikatagorikan baik. Nilai yang ditargetkan sudah berwarna Hijau. Penjabaran detail mengenai capaian IKU akan dijelaskan secara rinci dalam sub bahasan Evaluasi dan Analisis Kinerja.

3.2 Evaluasi dan Analisa Kinerja

Pelaksanaan evaluasi dan analisis kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi BRPSDI. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja (IK) yang telah diidentifikasi agar sasaran kegiatan dan tujuan organisasi sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja BRPSDI yang menjadi kontrak kinerja pada Tahun 2023 dapat tercapai.

SK 1. Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker

Pada sasaran kegiatan ini BRPSDI berperan serta dalam mendukung Sasaran Strategis KKP yaitu “Tata Kelola Pemerintahan yang Baik” melalui Sasaran Kegiatan “Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker”. Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker tersebut dilakukan dengan menghasilkan PNBPN, meminimalisir nilai temuan LHP BPK atas LK BRPSDI, meningkatkan profesionalitas ASN BRPSDI, menerapkan sistem manajemen yang akuntabel, transparan, dan terukur sesuai dengan Permen PAN RB Nomor 88 Tahun 2021, meningkatkan nilai rekonsiliasi kinerja BRPSDI, menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar di lingkup BRPSDI khususnya dan lingkup KKP umumnya dengan berperan serta aktif menginformasikan kegiatan BRPSDI melalui aplikasi kinerjakkp.bitrix24.com, menindaklanjuti masukan/rekomendasi hasil pengawasan tim APIP KKP, meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran BRPSDI, meningkatkan nilai kinerja anggaran BRPSDI, melakukan kegiatan layanan Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya BRPSDI.

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran tersebut ada 11 (sebelas) IKK, yang dikelompokkan sebagai Indikator Kinerja Manajerial (IKM). Adapun penjabaran IKK tersebut antara lain:

IKM.1 Nilai PNBP (Rupiah Miliar)

IKM Nilai PNBP didefinisikan sebagai manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara dari sektor kelautan dan perikanan. Adapun Objek/Ruang Lingkup PNBP diantaranya pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), pelayanan, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), pengelolaan dana, dan hak negara lainnya.

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 IKM ini merupakan IKK baru yang dicascadingkan sampai level UPT. Besaran target yang ditetapkan yakni 0,021 Miliar rupiah. IKM nilai PNBP termasuk dalam IKK yang memiliki komposisi validitas Output Kendali Rendah, sedangkan untuk periodisasi waktu pengukuran dari IKK ini ialah triwulanan. Data dukung/bukti capaian yang disepakati ialah data realisasi PNBP yang diperoleh melalui aplikasi OMSPAN dan Surat Penyampaian Capaian IKK PNBP dari Kepala BRPSDI kepada Kepala Pusrisikan. Berikut merupakan capaian IKM nilai PNBP BRPSDI sampai dengan triwulan I Tahun 2023:

Tabel 5. Capaian IKM 1 BRPSDI triwulan I Tahun 2023

2023										
Sasaran Kegiatan 1. Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker										
IKM-1. Nilai PNBP BRPSDI (Rupiah Miliar)										
Realisasi TW I 2020-2022			2023					Renstra BRPSDI 2020 – 2024		
2020	2021	2022	Target 2023	Target TW I 2023	Realisasi TW I 2023	% Capaian	% Kenaikan TW I 2022-2023	% Capaian thd target 2023	Target 2024	% Capaian thd target 2024
-	-	-	0.021	0.002	0.002	100%	100.00	10%	0.023	8.70%

Keterangan: * IK ini merupakan IK Baru yang dicascading ke BRPSDI pada Tahun 2023

Berdasarkan data pada **Tabel 5**. Nilai capaian IKM Nilai PNBPs BRPSDI periode triwulan I Tahun 2023 yakni sebesar **Rp. 2.985.120,-** atau **0,002** Miliar Rupiah. Nilai penerimaan PNBPs BRPSDI yang diperoleh s.d 31 Maret 2023 bersumber dari Pendapatan Penggunaan Sarpras sesuai dengan Tusi, dan Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan (iuran sewa rumah negara). Berikut merupakan rincian capaian PNBPs BRPSDI per 31 Maret 2023:

NO	KODE AKUN JENIS PENDAPATAN	SETORAN				POTONGAN SPM	PENGEMBALIAN	REALISASI
		MPN		BI				
		PAJAK	NON PAJAK	PAJAK	NON PAJAK			
1	425151 Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	2.700.000	0	0	0	0	2.700.000
2	425131 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	0	0	0	285.120	0	285.120
GRAND TOTAL		0	2.700.000	0	0	285.120	0	2.985.120

Gambar 6. Realisasi Pendapatan Per Akun penerimaan per 31 Maret 2023

(sumber: <https://spanint.kemenkeu.go.id/>)

Nilai capaian tersebut tergolong sangat rendah jika dibandingkan dengan penerimaan PNBPs pada periode Tahun sebelumnya yakni **Rp. 56.216.069,-**. Jumlah penerimaan tersebut 96 % bersumber dari hasil pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin (lelang). Akan tetapi, PNBPs BRPSDI pada periode tersebut tidak dicascadingkan/ditetapkan sebagai IKK dalam dokumen PK Tahun 2022.

Sementara itu, jika dilihat persentase ketercapaian triwulan I terhadap target tahun 2023 hanya sebesar **10%**. Sedangkan presentase ketercapaian terhadap target Renstra, baru mencapai **8,7%**. Rendahnya capaian tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal. Berdasarkan hasil pemantauan dan pengendalian secara berkala, IKM Nilai PNBPs BRPSDI masuk dalam kategori IKK yang memiliki skala risiko sangat tinggi. Atas dasar tersebut, perlu dilakukan upaya-upaya strategis guna mengendalikan risiko dan dampak ketidaktercapaian IKK tersebut.

Faktor yang menyebabkan rendahnya capaian IKM PNBPs yakni adanya pembatasan jenis layanan publik dan produk layanan publik (**KepmenKP Nomor 54 Tahun 2022**) terutama yang berkaitan dengan Jasa analisa laboratorium yang selama ini menjadi sumber pendapatan utama BRPSDI, Keterbatasan aset yang

dapat dikelola/manfaatkan untuk kerjasama pemanfaatan aset. Adapun upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian IKM tersebut antara lain, BRPSDI telah berkonsultasi dengan KPKNL Kab. Purwakarta pada Tanggal 15 Februari 2023 untuk mendapatkan saran dan rekomendasi terkait pola/mechanisme pemanfaatan aset BMN yang dapat dijadikan sebagai sumber penerimaan negara dari pemanfaatan BMN, BRPSDI juga telah bersurat secara resmi ke KPKNL Kab. Purwakarta untuk asistensi penaksiran besaran tarif sewa alat yang dikelola oleh BRPSDI.

IKM 2. Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK BRPSDI dibandingkan Realisasi Anggaran BRPSDI 2022 (%)

IKK ini didefinisikan sebagai Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Atas LK Unit Kerja merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Temuan dimaksud adalah temuan yang bersifat Tuntutan Ganti Rugi (TGR), yang menurut ketentuan batas waktu penyelesaian selama 60 hari.

Tabel 6. Capaian IKM 2 BRPSDI triwulan I Tahun 2023

2023											
Sasaran Kegiatan 1. Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker											
IKM-2. Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK BRPSDI dibandingkan Realisasi Anggaran BRPSDI 2022 (%)											
Realisasi TW I 2020-2022			2023					Renstra BRPSDI 2020-2024			
2020	2021	2022	Target 2023	Target TW I 2023	Realisasi TW I 2023	% Capaian	% Kenaikan TW I 2022-2023	% Capaian thd target 2023	Target 2024	% Capaian thd target 2024	
-	-	-	<0.5	-	-	-	-	-	<0.5	-	

Pengukuran IKM 2 ini dilakukan dengan cara membandingkan temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan (LK) BRPSDI sesuai yang ditetapkan Biro Keuangan, Setjen KKP dengan realisasi anggaran BRPSDI. IKU LHP BPK pada triwulan I belum dapat diukur, dikarenakan IKM ini bersifat Tahunan sehingga belum dapat dilakukan pengukuran dan verifikasi atas capaian kinerja pada periode triwulan I Tahun 2023.

IKM 3. Indeks Profesionalitas ASN BRPSDI (indeks)

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2019 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Nilai capaian indeks profesionalitas ASN diperoleh dari jumlah nilai kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN. Nilai kesesuaian kualifikasi pendidikan dapat ditingkatkan melalui penugasan belajar pada pegawai. Nilai kompetensi dapat ditingkatkan dengan mengirimkan pegawai pada diklat kepemimpinan untuk pejabat struktural, diklat teknis dan fungsional untuk fungsional umum dan pejabat fungsional, serta seminar untuk pegawai yang terkait dengan bidang tugasnya masing-masing. Nilai kinerja diperoleh dari pengukuran pada aplikasi e-SKP KKP (<http://prestasikerja.kkp.go.id/>). Sedangkan nilai kedisiplinan ditentukan berdasar ada tidaknya hukuman disiplin yang dikenakan pada pegawai

Tabel 7. Capaian IKM 3 BRPSDI triwulan I Tahun 2023

2023										
Sasaran Kegiatan 1. Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker										
IKM-3. Indeks Profesionalitas ASN BRPSDI (Indeks)										
Realisasi TW I 2020-2022			2023					Renstra BRPSDI 2020 – 2024		
2020	2021	2022	Target 2023	Target TW I 2023	Realisasi TW I 2023	% Capaian	% Kenaikan TW I 2022-2023	% Capaian thd target 2023	Target 2024	% Capaian thd target 2024
-	-	-	80	-	-	-	-	-	80	-

Pengukuran IKM Indeks Profesionalitas ASN dilakukan berdasarkan data yang diperoleh dari aplikasi ropeg KKP (<http://ropeg.kkp.go.id/>). IKU ini belum dapat diukur, dikarenakan IKM ini bersifat Semesteran sehingga belum dapat dilakukan pengukuran dan verifikasi atas capaian kinerja pada periode triwulan I Tahun 2023

IKM 4. Nilai PM SAKIP BRPSDI (Nilai)

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mengamanatkan Instansi pemerintah untuk lebih akuntabel dan lebih bertanggung jawab terhadap kinerja atau hasil yang telah dicapai. Akuntabilitas Kinerja sebagai suatu kondisi dimana instansi pemerintah telah merubah orientasinya dari yang biasanya berorientasi kepada anggaran (input) atau kegiatan (output) semata menjadi berorientasi kepada hasil atau outcome. Dalam rangka evaluasi tingkat akuntabilitas, Inspektorat Jenderal KKP melakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja pada masing-masing unit eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan, sementara Kementerian PANRB melakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja pada tingkat kementerian Pusat/Daerah.

Penilaian SAKIP di lingkup KKP sampai dengan tahun 2021, dilakukan berdasarkan Permen PAN RB 12 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan pada tahun 2022 penilaian SAKIP menggunakan peraturan baru dengan terbitnya Permen PAN RB nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perubahan mendasar dalam penilaian SAKIP yaitu adanya penggabungan dan pembobotan dalam komponen

penilaian, keselarasan cascading untuk melihat keselarasan kinerja organisasi, sistem reward and punishment, penambahan kriteria penilaian dari 5 menjadi 8 kriteria, serta orientasi penilaian lebih kearah dampak implementasi SAKIP atau outcome. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi akuntabilitas kinerja internal (25%).

IKM Nilai PM SAKIP BRPSDI merupakan IKK Baru yang diturunkan pada Tahun 2023. Hal ini bertujuan untuk memonitoring perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon III lingkup BRSDM.

Tabel 8. Capaian IKM 4 BRPSDI triwulan I Tahun 2023

2023										
Sasaran Kegiatan 1. Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker										
IKM-4. Nilai PM SAKIP BRPSDI (Nilai)										
Realisasi TW I 2020-2022			2023					Renstra BRPSDI 2020 – 2024		
2020	2021	2022	Target 2023	Target TW I 2023	Realisasi TW I 2023	% Capaian	% Kenaikan TW I 2022-2023	% Capaian thd target 2023	Target 2024	% Capaian thd target 2024
-	-	-	78	-	-	-	-	-	78	-

IKM Nilai PM SAKIP BRPSDI belum dapat diukur pada periode triwulan I, dikarenakan IKM ini bersifat Tahunan. Namun umumnya penilaian mandiri/uji petik implementasi SAKIP baik yang dilakukan secara mandiri oleh tim SAKIP internal satker ataupun Inspektorat Jenderal KKP dilakukan pada periode triwulan III.

IKM 5. Nilai Rekonsiliasi Kinerja BRPSDI (Nilai)

IKK ini didefinisikan sebagai indikator yang menunjukkan keselarasan antara dokumen Laporan Kinerja (LKj), Target Kinerja dan Cara Pencapaian Kinerja dari masing-masing indikator yang diperjanjikan dalam PK.

IKM Nilai Rekonsiliasi Kinerja terbagi menjadi 3 (tiga) aspek penilaian, yakni:

1. Aspek Kepatuhan, dilakukan dengan melakukan penilaian pada ketersediaan dokumen yang dibutuhkan yang meliputi : PK, Manual IKU, Rincian Target IKU, Renaksi, LKJ/LCK TW I s.d III dan data dukung LKJ/LCK TW III;
2. Aspek Kesesuaian, dilakukan dengan melihat rata-rata nilai kesesuaian dokumen pada kriteria kesesuaian target, kesesuaian realisasi dan kesesuaian informasi data;
3. Aspek Ketercapaian, dilakukan dengan melihat rata-rata nilai pencapaian IKU + IK pada TW I, TW II dan TW III Tahun 2022 pada aplikasi kinerja.

IKM Rekonsiliasi kinerja merupakan IKK yang dicascadingkan langsung oleh Pusat Riset Perikanan dan bersifat Tahunan. Bukti dukung capaian IKK ini adalah Kertas Kerja Rekonsiliasi Kinerja yang ditandatangani oleh Pembahas dan Kepala Balai.

Tabel. 9 Capaian IKM 5 BRPSDI triwulan I Tahun 2023

2023										
Sasaran Kegiatan 1. Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker										
IKM-5. Nilai Rekonsiliasi Kinerja BRPSDI (Nilai)										
Realisasi TW I 2020-2022			2023					Renstra BRPSDI 2020 – 2024		
2020	2021	2022	Target 2023	Target TW I 2023	Realisasi TW I 2023	% Capaian	% Kenaikan TW I 2022-2023	% Capaian thd target 2023	Target 2024	% Capaian thd target 2024
-	-	-	92	-	-	-	-	-	92	-

IKM Nilai Rekonsiliasi Kinerja BRPSDI belum dapat diukur pada periode triwulan I, dikarenakan IKM ini bersifat Tahunan. Namun umumnya penilaian Rekonsiliasi Kinerja dilakukan pada awal triwulan IV dan difasilitasi oleh BRSDM KP. Verifikasi dan validasi hasil penilaian internal di asistensi oleh tim verifikator dari BRSDM KP.

IKM 6. Persentase unit kerja BRPSDI yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)

Merujuk pada Permen PAN & RB Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Pengetahuan (*Knowledge Management*), KKP telah menetapkan salah satu indikator kinerja utamanya yaitu “Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)”, dimana target pada tahun 2023 sebesar 92%. Sesuai dengan definisi pada manual indikator kinerja utama tingkat KKP, Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari.

Salah satu perangkat berbasis teknologi informasi yang digunakan sebagai implementasi dalam pengukuran indikator kinerja ini yaitu aplikasi “**Bitrix24**”. Aplikasi Bitrix24 merupakan media sistem informasi yang digunakan dalam penerapan manajemen pengetahuan di lingkungan KKP dengan alamat *website* <https://kinerjakkp.bitrix24.com/>. Untuk dapat bergabung di sistem aplikasi ini, administrator Bitrix24 mengundang pegawai KKP melalui email. Setelah undangan tersebut diverifikasi, pegawai dapat membuat akun bitrix24, pegawai KKP terhubung dengan pegawai lainnya dan dapat melakukan interaksi dalam bentuk uraian teks, gambar, audio, dan video. Pegawai KKP dapat melakukan penyebaran informasi dan polling menggunakan Bitrix24. Selain itu, pegawai KKP dapat memanfaatkan fitur pengeditan data bersama yang tersimpan dalam sistem komputasi awan di Bitrix24.

Dalam jangka panjang, jika telah dilakukan integrasi terhadap sistem informasi yang digunakan dalam proses kerja dalam organisasi, fasilitas ini bisa berkembang untuk mendeteksi pemanfaatan pengetahuan yang ada dalam pengambilan keputusan di segenap lingkungan KKP yang dapat diakses melalui alamat <https://kinerjakkp.bitrix24.com/> seperti terlihat pada gambar berikut:

Tabel 10. Capaian IKM 6 BRPSDI triwulan I Tahun 2023

2023										
Sasaran Kegiatan 1. Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker										
IKM-6. Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar BRPSDI (%)										
Realisasi TW I 2020-2022			2023					Renstra BRPSDI 2020 – 2024		
2020	2021	2022	Target 2023	Target TW I 2023	Realisasi TW I 2023	% Capaian	% Kenaikan TW I 2022-2023	% Capaian thd target 2023	Target 2024	% Capaian thd target 2024
68.06	84.44	100	92	92	100	109%	0.00%	109%	92	109%

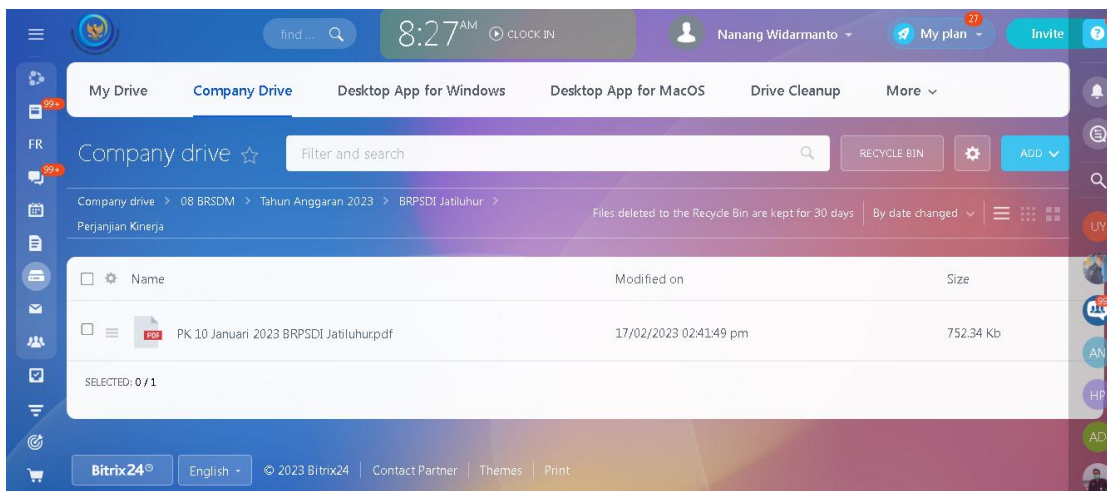
Nilai capaian IKM ini diukur berdasarkan 2 komponen pembentuk, yang diantaranya Sharing dokumen, dan Keaktifan Pejabat/Staf dalam menyampaikan berita atau informasi kegiatan Satuan Kerja (Satker). Berikut merupakan hasil perhitungan IKM Persentase unit kerja BRPSDI yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%) berdasarkan ketiga komponen tersebut.

Tabel 11. Hasil Perhitungan kmponen pembentuk IKM Manajemen Terstandar satker lingkup Pusat Riset Perikanan

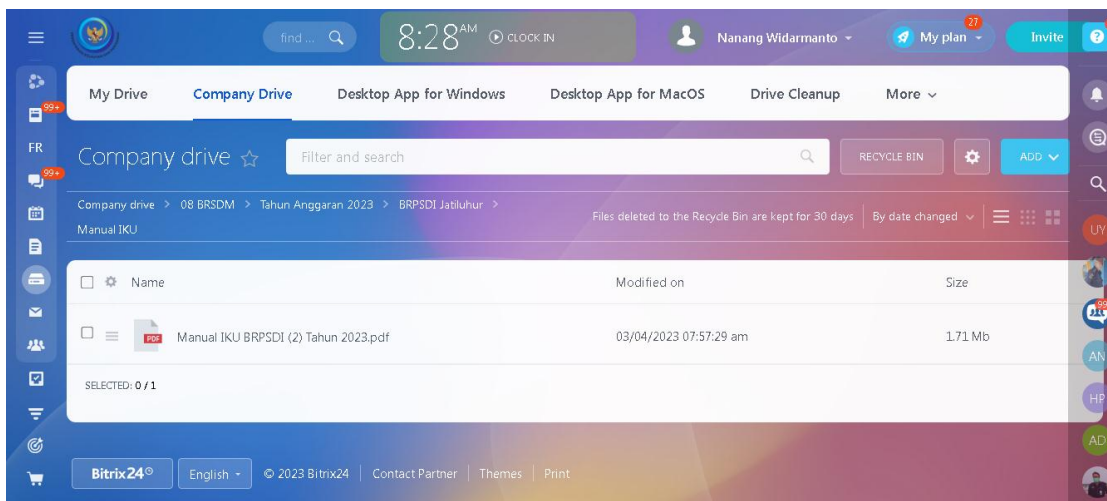
Nama Unit Kerja	Dokumen	Keaktifan	Capaian MP
BRPPUPP	100.00%	100.00%	100.00%
BRPBAPPP	100.00%	100.00%	100.00%
BRPBATPP	100.00%	100.00%	100.00%
BBRBLPP	100.00%	100.00%	100.00%
BRBIH	100.00%	100.00%	100.00%
BRPL	100.00%	100.00%	100.00%
BRPSDI	100.00%	100.00%	100.00%
BRPI	100.00%	100.00%	100.00%
LRPT	100.00%	100.00%	100.00%
LRBRL	100.00%	100.00%	100.00%
LRMPHP	100.00%	100.00%	100.00%

Nilai Presentase capaian Sharing Dokumen diperoleh berdasarkan dengan Jumlah dokumen penting dan strategis (Perjanjian Kinerja, Manual IKU, Rencana Aksi dan Laporan Kinerja) yang diupload pada Aplikasi Bitrix24. Pada periode triwulan I Tahun 2023 BRPSDI sudah melakukan upload 1 (satu) dokumen Perjanjian Kinerja pada Aplikasi Bitrix24, 1 (satu) dokumen Manual IKU, 1 (satu)

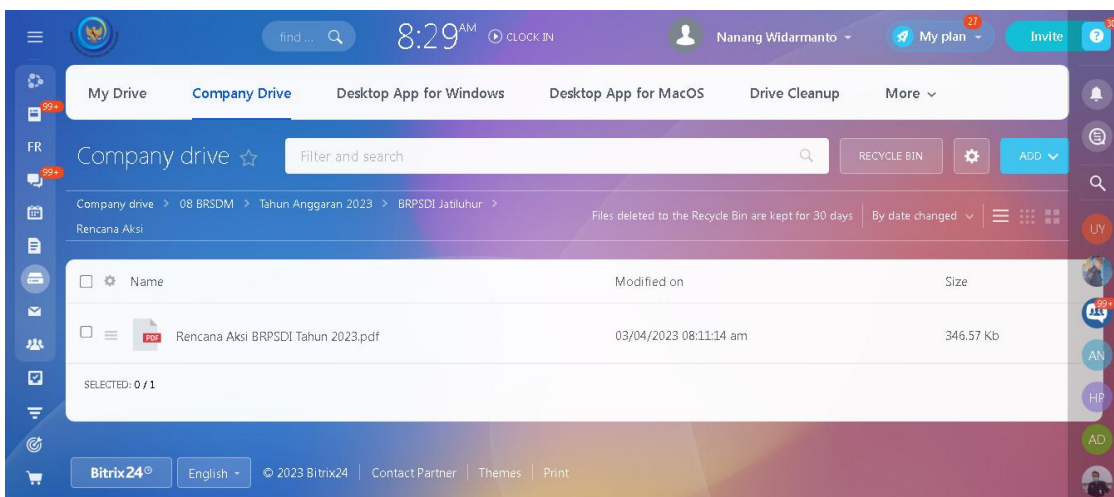
dokumen Rencana Aksi, dan 1 (satu) dokumen Laporan Kinerja Tahun 2022. jika diukur berdasarkan dengan data tersebut diperoleh nilai capaian sebesar 100 %



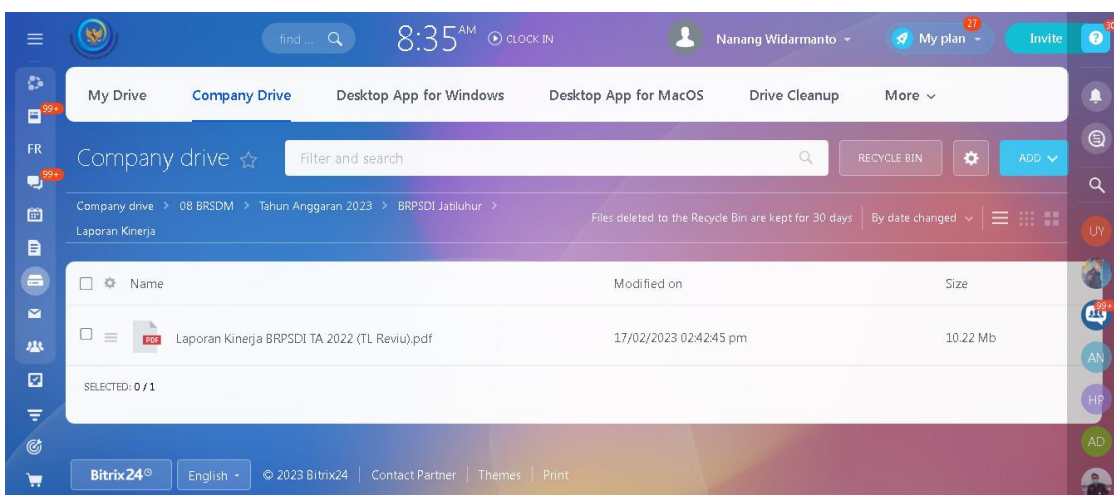
Gambar 6. Screenshot dokumen Perjanjian Kinerja yang sudah diupload pada laman Bitrix24 KKP Sumber: <https://kinerjakkp.bitrix24.com/>



Gambar 7. Screenshot dokumen Manual IKU yang sudah diupload pada laman Bitrix24 KKP Sumber: <https://kinerjakkp.bitrix24.com/>



Gambar 8. Screenshoot dokumen Rencana Aksi yang sudah diupload pada laman Bitrix24 KKP Sumber: <https://kinerjakkp.bitrix24.com/>



Gambar 9. Screenshoot dokumen Laporan Kinerja yang sudah diupload pada laman Bitrix24 KKP Sumber: <https://kinerjakkp.bitrix24.com/>

Nilai Presentase Capaian Keaktifan Pejabat/Pegawai diperoleh berdasarkan dengan Jumlah Pejabat/Staf yang aktif membagikan berita atau informasi kegiatan Satuan Kerja (Satker) pada Aplikasi Bitrix24. Selama periode triwulan I Tahun 2023 Pejabat/Staf BRPSDI yang aktif melakukan sharing berita atau informasi ke aplikasi Bitrix 24 yaitu Kepala Balai, Kepala Sub Koordinator Tata Usaha, Kepala Sub Koordnator Tata Operasional, dan Kepala Sub Koordnator Pelayanan Teknis, sehingga nilai capaian komponen ini hanya sebesar 100 %. Berdasarkan perhitungan ketiga komponen tersebut diperoleh nilai capaian total sebagai berikut:

Tabel 12. Perhitungan Capaian IKM Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pusrisikan (%)

UPT	Nilai TW I	Capaian TW I	Nilai TW II	Capaian TW II	Nilai TW III	Capaian TW III	Nilai TW IV	Capaian TW IV
BRPPUPP	100.00%	100.00%	-	-	-	-	-	-
BRPBAPP	100.00%	100.00%	-	-	-	-	-	-
BRPBATPP	100.00%	100.00%	-	-	-	-	-	-
BBRBLPP	100.00%	100.00%	-	-	-	-	-	-
BRBIH	100.00%	100.00%	-	-	-	-	-	-
BRPI	100.00%	100.00%	-	-	-	-	-	-
BRPSDI	100.00%	100.00%	-	-	-	-	-	-
BRPI	100.00%	100.00%	-	-	-	-	-	-
LRPT	100.00%	100.00%	-	-	-	-	-	-
LRBRL	100.00%	100.00%	-	-	-	-	-	-
LRMPHP	100.00%	100.00%	-	-	-	-	-	-

Nilai Capaian IKM Persentase unit kerja BRPSDI yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%) periode triwulan I tahun 2023 adalah **100%**. Nilai capaian tersebut sama dengan periode Tahun 2022. Tingkat ketercapaian IKU terhadap target Tahun 2023 mencapai 109%, begitupun dengan tingkat ketercapaian IKU terhadap target Renstra 2020-2024, yakni 109%.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan pencapaian indikator ini ialah pejabat rutin melakukan update berita/informasi, dan dokumen perencanaan beserta LKJ diupload tepat waktu. Adapun upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan keberhasilan indikator ialah melakukan monitoring rutin terhadap keaktifan pejabat maupun staf dalam penginputan/*sharing* informasi/berita pada laman bitrix24 KKP, melakukan *updating* dokumen secara berkala. Upaya tersebut juga didukung oleh komitmen pimpinan dalam mengawal pencapaian IKK tersebut dengan melakukan monitoring, pengawasan serta pengendalian rutin setiap bulan.

IKM 7. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan BRPSDI yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)

IKM ini didefinisikan sebagai Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode Triwulan IV Tahun 2022 s.d. Triwulan III Tahun 2023 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh unit Eselon II lingkup BRSDM. IKM Persentase Rekomendasi hasil pengawasan BRPSDI yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%) dikategorikan sebagai IKK yang memiliki tingkat validitas output kendali tinggi. Periode sasi pengukuran IKK ini dilakukan setiap triwulan.

IKM ini merupakan IKK baru yang dicascadingkan ke lingkup UPT mulai Tahun 2023 dengan target 75%. Adapun nilai capaian IKM ini ialah sebagai berikut:

Tabel 13. Capaian IKM 7. BRPSDI triwulan I Tahun 2023

2023										
Sasaran Kegiatan 1. Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker										
IKM-7. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan BRPSDI yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)										
Realisasi TW I 2020-2022			2023					Renstra BRPSDI 2020 – 2024		
2020	2021	2022	Target 2023	Target TW I 2023	Realisasi TW I 2023	% Capaian	% Kenaikan TW I 2022-2023	% Capaian thd target 2023	Target 2024	% Capaian thd target 2024
-	-	-	75	75	75	100%	100%	100%	75	100%

Berdasarkan data pada Tabel 15. Diketahui bahwa nilai capaian IKM ini ialah 75%. Nilai tersebut merupakan representasi atas seluruh rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode Triwulan IV Tahun 2022 s.d. Triwulan III Tahun 2023 telah ditindaklanjuti oleh tim secara tuntas. Nilai Capaian IKM tidak dapat dibandingkan dengan periode Tahun 2022. Hal ini dikarenakan pada periode tersebut, IKK Persentase Rekomendasi hasil pengawasan BRPSDI yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%) tidak diturunkan sampai ke level UPT. Sedangkan Tingkat ketercapaian IKU terhadap target Tahun

2023 mencapai 100%, begitupun dengan tingkat ketercapaian IKU terhadap target Renstra 2020-2024, yakni 100%.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan pencapaian indikator ini ialah setiap proses pelaksanaan kegiatan mulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan mengacu pada asas kepatuhan, akuntabilitas, proporsionalitas, profesionalitas dan kewajaran. Dukungan SDM yang profesional dan kompeten.

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan keberhasilan indikator ialah Kepala Balai dalam setiap kesempatan selalu menekankan untuk menyelesaikan laporan pertanggungjawaban secara tepat waktu dan tertib administrasi, serta mengikuti kaidah dan ketentuan yang berlaku. Pimpinan juga melakukan pemantauan terhadap progres tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan dari Itjen/eksternal. Mendorong setiap SDM di lingkup BRPSDI untuk mengikuti pengembangan kapasitas maupun kemampuan teknis di masing-masing bidang/fungsional yang telah dipilih secara rutin.

IKM 8. Nilai IKPA BRPSDI (Nilai)

Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah evaluasi dan *spending review* terhadap optimalisasi peran belanja Kementerian/Lembaga dalam rangka ketahanan fiskal dan ekonomi dengan berdasarkan 12 (dua belas) Indikator Pelaksanaan Anggaran yaitu Revisi DIPA, Halaman III DIPA, Pengelolaan UP, Rekon LPj Bendahara, Data Kontrak, Penyelesaian Tagihan, Penyerpan Anggaran, Retur SP2D, Perencanaan Kas, Pengembalian SPM, Dispensasi Penyampaian SPM, dan Pagu Minus.

IKK ini ditetapkan untuk mengukur aspek implementasi dan manfaat pengelolaan anggaran dalam upaya mewujudkan peningkatan pranata dan kelembagaan birokrasi BRPSDI yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima. IKK ini tergolong sebagai indikator dengan tingkat validitas output kendali rendah, yakni indikator yang pencapaiannya tidak dipengaruhi secara dominan oleh pemilik indikator. Dengan kata lain, capaian indikator ini dipengaruhi oleh

pihak-pihak/stakeholder lain, baik secara langsung (kebijakan, kontribusi, keterlibatan) maupun tidak langsung (instrumen).

Tabel 14. Capaian IKM 8. BRPSDI triwulan I Tahun 2023

2023										
Sasaran Kegiatan 1. Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker										
IKM-8. Nilai IKPA BRPSDI (nilai)										
Realisasi TW I 2020-2022			2023					Renstra BRPSDI 2020 – 2024		
2020	2021	2022	Target 2023	Target TW I 2023	Realisasi TW I 2023	% Capaian	% Kenaikan TW I 2022-2023	% Capaian thd target 2023	Target 2024	% Capaian thd target 2024
-	-	-	89	-	-	-	-	-	89	-

IKM Nilai IKPA BRPSDI belum dapat diukur pada periode triwulan I, dikarenakan IKM ini bersifat Semesteran. Penilaian IKM ini menggunakan instrumen dari Kementerian Keuangan, yaitu aplikasi OMSPAN (**Online Monitoring – Sistem Perbendaharaan dan Administrasi Negara**) pada *website* (<https://spanint.kemenkeu.go.id/>). Hasil penilaian IKM tersebut disampaikan oleh Biro Keuangan melalui Nota Dinas Sekjen KKP.

IKM 9. Nilai Kinerja Anggaran BRPSDI (Nilai)

IKK ini didefinisikan sebagai persentase pelaksanaan anggaran dibanding dengan alokasi anggaran. IKK ini bertujuan untuk menghasilkan output anggaran tertentu dengan input anggaran serendah-rendahnya atau dengan input anggaran tertentu mampu menghasilkan output sebesar-besarnya.

IKK ini tergolong sebagai indikator dengan tingkat validitas output kendali rendah, yakni indikator yang pencapaiannya tidak dipengaruhi secara dominan oleh pemilik indikator. Dengan kata lain, capaian indikator ini dipengaruhi oleh pihak-pihak/stakeholder lain, baik secara langsung (kebijakan, kontribusi, keterlibatan) maupun tidak langsung (instrumen).

Tabel 15. Capaian IKM 9. BRPSDI triwulan I Tahun 2023

2023										
Sasaran Kegiatan 1. Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker										
IKM-9. Nilai Kinerja Anggaran BRPSDI (nilai)										
Realisasi TW I 2020-2022			2023					Renstra BRPSDI 2020 – 2024		
2020	2021	2022	Target 2023	Target TW I 2023	Realisasi TW I 2023	% Capaian	% Kenaikan TW I 2022-2023	% Capaian thd target 2023	Target 2024	% Capaian thd target 2024
-	-	-	82	-	-	-	-	-	82	-

IKM Nilai Kinerja Anggaran BRPSDI belum dapat diukur pada periode triwulan I, dikarenakan IKM ini bersifat Tahunan. Penilaian IKM ini dilakukan dengan menggunakan instrumen eksternal yakni aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu Direktorat Jendral Anggaran, Kementerian Keuangan (SMART DJA) (<http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id/>). Hasil penilaian IKM tersebut disampaikan oleh Biro Keuangan melalui Nota Dinas Sekjen KKP.

IKM 10. Kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti lingkup BRPSDI (Kemitraan)

IKK ini didefinisikan sebagai Kemitraan adalah suatu kerja sama formal yang saling menguntungkan antara BRPSDI dengan pihak eksternal KKP (dalam dan luar negeri) untuk mencapai tujuan bersama berdasarkan kesepakatan prinsip bersama. Bentuk kemitraan diantaranya di bidang pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan dan pemanfaatan BMN BRPSDI mengacu pada PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNPB yang berlaku pada KKP, PMK Nomor 115 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan BMN, dan Permen KP Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerjasama dan Perjanjian

Cara pengukuran capaian IKK ini dapat dinilai berdasarkan Jumlah kemitraan yang terjalin dan masih berlaku pada tahun berjalan. IKK ini memiliki perodesasi waktu pengukuran Tahunan, namun dapat tercapai sebelum Tahun anggaran berakhir. Akan tetapi pada periode tahun ini, BRPSDI belum menjalin kemitraan baru dengan pihak eksternal KKP. Nilai capaian IKM Kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti lingkup BRPSDI (Kemitraan) tersaji pada tabel 18.

Tabel 16. Capaian IKM 10. BRPSDI triwulan I Tahun 2023

2023										
Sasaran Kegiatan 1. Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker										
IKM-10. Kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti lingkup BRPSDI (Kemitraan)										
Realisasi TW I 2020-2022			2023					Renstra BRPSDI 2020 – 2024		
2020	2021	2022	Target 2023	Target TW I 2023	Realisasi TW I 2023	% Capaian	% Kenaikan TW I 2022-2023	% Capaian thd target 2023	Target 2024	% Capaian thd target 2024
3	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-

Berdasarkan **Tabel 16**. Diketahui bahwa belum ada Kemitraan yang terbentuk/terjalin antara BRPSDI dengan pihak eksternal KKP. Sedangkan pada periode yang sama tahun 2020, BRPSDI telah menjalin 3 kemitraan/kerjasama. Ada beberapa hal yang menjadi penyebab/kendala dalam pelaksanaan kegiatan pendukung IKK ini, antara lain:

1. UPT eks riset BRSDM KP sudah tidak diperbolehkan melakukan kegiatan apapun yang berkaitan dengan fungsi riset pasca pengalihan fungsi riset K/L ke BRIN;
2. Ketidakjelasan perubahan organisasi KKP menghambat rencana inisiasi kemitraan/kerjasama, karena dikhawatirkan BRPSDI mengalami perubahan tusi, dan kemitraan yang sudah terbentuk tidak linear dengan tusi yang baru;
3. Alternatif kemitraan dalam hal pemanfaatan BMN terkendala dengan status, kondisi dan jumlah aset BMN yang terbatas. Aset BMN BRPSDI saat ini yang dapat dimanfaatkan/dikerjasamakan hanya alat laboratorium dan *Guest house*.

Bentuk kemitraan yang masih memungkinkan/relevan dengan kondisi eksisting BRPSDI saat ini, yakni kemitraan dalam hal pengembangan SDM. Sejauh ini, BRPSDI masih berupaya membangun komunikasi dengan beberapa pihak, terutama civitas akademik. Diharapkan pasca terbitnya SOTK baru, nomenklatur, tugas dan fungsi BRPSDI yang baru dapat memberikan peluang untuk menarik minat pihak eksternal untuk membangun kemitraan.

IKM 11. Persentase dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya BRPSDI (%)

IKK ini didefinisikan sebagai 'Layanan dukungan manajemen merupakan pelaksanaan kegiatan yang melibatkan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BRPSDI berupa penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang perikanan.

Dokumen layanan dukungan manajemen dihasilkan dari kegiatan penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, kerjasama, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan data, diseminasi, publikasi, keuangan, pengelolaan aset, kepegawaian, dll.

IKM Persentase dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya BRPSDI (%) bersifat Triwulanan, dengan tingkat validasi IKU output kendali tinggi. Bukti dukung capaian IKK ini adalah Dokumen layanan dukungan manajemen internal satker yang tersedia dari kegiatan penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, kerjasama, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan data, diseminasi, publikasi, keuangan, pengelolaan aset, kepegawaian dapat berupa laporan, matrik, screen shoot aplikasi yang mendapatkan pengesahan dari Koordinator/Sub Koordinator dan ditandatangani pimpinan satker.

Tabel. 17 Capaian IKU 11. BRPSDI triwulan I Tahun 2023

2023										
Sasaran Kegiatan 1. Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker										
IKM-11. Persentase dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya BRPSDI (%)										
Realisasi TW I 2020-2022			2023					Renstra BRPSDI 2020 – 2024		
2020	2021	2022	Target 2023	Target TW I 2023	Realisasi TW I 2023	% Capaian	% Kenaikan TW I 2022-2023	% Capaian thd target 2023	Target 2024	% Capaian thd target 2024
-	-	100	100	100	100	100%	0%	100%	100	100%

Berdasarkan Tabel 17. IKM Persentase dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya BRPSDI (%) triwulan I Tahun 2023 sebesar 100%. Nilai capaian tersebut sama dengan tahun 2022. Nilai Capaian tersebut merupakan representasi dari kegiatan yang sudah terlaksana dan telah menghasilkan output berupa laporan kegiatan. Laporan tersebut diantaranya laporan mingguan, laporan SPIP bulanan, laporan layanan keuangan, laporan bulanan. Berikut merupakan rincian dokumen manajerial/stratgeis lainnya yang sudah tercapai selama triwulan I Tahun 2023

Tabel 18. Hasil Perhitungan Capaian IKM Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya BRPSDI triwulan I Tahun 2023

NO	LAPORAN	S.D TW I		PRESENTASE
		TARGET	CAPAIAN	
1	Laporan Layanan Keuangan	3	3	100%
2	Laporan Bulanan	3	3	100%
3	Laporan Mingguan	13	13	100%
4	Laporan SPIP	1	1	100%
Total		20	20	100%

Faktor-faktor pendukung tercapainya IKM Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya BRPSDI ini yaitu terlaksananya seluruh kegiatan manajerial berupa laporan akhir serta terlaksananya monitoring dan evaluasi setiap pelaksanaan kegiatannya. Adapun Upaya yang telah dilakukan yakni setiap progres kegiatan dimonitor oleh kepala balai dan dilaporkan secara rutin oleh penanggung jawab kegiatan tiap minggu dalam apel pagi dan rapat internal.

3.1. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Jumlah anggaran untuk pembiayaan kegiatan Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan (BRPSDI) pada Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2023 Nomor: SP DIPA- 032.12.2.403824/2023 Tahun Anggaran 2023 yang stelah

disahkan pada tanggal 30 November 2022 adalah sebesar **Rp 7.342.015.000**, Selama periode triwulan I Tahun 2023, BRPSDI telah melakukan 1 (satu) kali revisi DIPA. Hal tersebut berkaitan dengan penyesuaian RPD. Berikut merupakan kronologis revisi DIPA yang telah dilakukan BRPSDI selama triwulan I tahun 2023.

Revisi I DIPA, berkaitan dengan Pergeseran antar-RO dan/atau dalam RO yang sama, dalam KRO yang sama dan Perubahan rencana penarikan dana dan/atau rencana penerimaan dalam halaman III DIPA. Sesuai dengan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Revisi II Petikan Tahun Anggaran 2023 Nomor: SP DIPA- 032.12.2.403824/2023 Tahun Anggaran 2022 yang telah disahkan pada tanggal 15 Februari, Jumlah Anggaran BRPSDI tetap, yakni sebesar **Rp.7.342.015.000,-**.

Total anggaran tersebut terdiri dari dua jenis belanja anggaran yakni, belanja pegawai (51) sebesar **Rp. 3.447.681.000,-** dan belanja barang (52) sebesar **Rp. 3.894.334.000,-**. Jumlah realisasi keuangan BRPSDI berdasarkan aplikasi OMSPAN/SAKTI per tanggal 31 Maret 2023 ialah **15,31 %** atau **Rp. 1.124.151.776,-** yang terbagi ke dalam dua jenis belanja anggaran, yakni belanja pegawai (51) **Rp. 454.148.522,-** atau **13,17 %** dan belanja barang (52) **Rp. 670.003.254,-** atau **17,20 %**. Berikut merupakan detail pelaksanaan anggaran BRPSDI triwulan I Tahun 2023.

Tabel 19. Realisasi anggaran BRPSDI berdasarkan jenis belanja triwulan I Tahun Anggaran 2023 per tanggal 31 Maret 2023 pada aplikasi SAKTI.

No.	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%
1.	Belanja Pegawai	3,447,681,000	454,148,522	13.17%
2.	Belanja Barang	3,894,334,000	670,003,254	17.20%
3.	Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Total Anggaran :		7,342,015,000	1,124,151,776	15.31%

Realisasi Anggaran BRPSDI Per Sasaran Kegiatan Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Pagu	Realisasi	%
1	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	7,342,015,000	1,124,151,776	15.3%
Jumlah Total Anggaran :		7,342,015,000	1,124,151,776	15.3%

Tabel 20. Realisasi Anggaran BRPSDI per IKK Tahun 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Unit PJ	Target	Realisasi	RO Pendukung	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (%)		
KEGIATAN 3. Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan c)										
1	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	1	Nilai PNPB BRPSDI (Rupiah Miliar)	Sub Bagian Umum	0,021	0,0029	Layanan BMN - Pelayanan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Riset Perikanan	9,390,000	1,740,000	19%
		2	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK BRPSDI dibandingkan Realisasi Anggaran BRPSDI 2022 (%)	Sub Bagian Umum	≤0,5		1. Layanan Umum - Pelayanan Tata Usaha dan Kerumahtanggaan 2. Layanan Manajemen Keuangan 3. Layanan Perkantoran	7,161,511,000	1,102,924,025	15%
		3	Indeks Profesionalitas ASN BRPSDI (Indeks)	Sub Koordinator Kepegawaian	80		1. Layanan Manajemen SDM - Pelayanan Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Riset Perikanan - Pelayanan Jabatan Fungsional Riset Perikanan	15,160,000	2,218,000	15%
		4	Nilai PM SAKIP BRPSDI (Nilai)	Sub Koordinator TO	78		Layanan Pemantauan dan Evaluasi Riset Perikanan - Pelaksanaan Monev Kegiatan dan Anggaran	10,180,000	1,429,000	14%
		5	Nilai Rekonsiliasi Kinerja BRPSDI (Nilai)	Sub Koordinator TO	92		Layanan Pemantauan dan Evaluasi Riset Perikanan - Pelayanan Pelaporan dan Pengukuran Kinerja	9,800,000	1,991,000	20%
		6	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar BRPSDI (%)	Sub Koordinator PT	92	100	Layanan Data dan Informasi - Pelayanan Sistem Informasi Riset Perikanan (Pengelolaan Sistem informasi Terstandar dan One Data)	11,400,000	1,037,751	9%



7	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan BRPSDI yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	Sub Koordinator TO	75		Layanan Umum - Pelayanan Tata Usaha dan Kerumahtanggaan Riset Perikanan (Implementasi Sistem Pengawasan Intern Instansi Pemerintah)	8,340,000	1,985,000	24%
8	Nilai IKPA BRPSDI (nilai)	Sub Koordinator TO	89		Layanan Perencanaan dan Penganggaran - Pelayanan Perencanaan dan Penganggaran Internal Riset Perikanan (Penyusunan Rencana dan Revisi Anggaran)	21,800,000	1,999,000	9%
9	Nilai Kinerja Anggaran BRPSDI (nilai)	Sub Koordinator TO	82		Layanan Perencanaan dan Penganggaran - Pelayanan Perencanaan dan Penganggaran Internal Riset Perikanan (Penyusunan Rencana dan pementapan program manajerial)	13,675,000	1,809,000	13%
10	Kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti lingkup BRPSDI (Kemitraan)	Sub Koordinator PT	2		Layanan Hubungan Masyarakat - Pelayanan Kerjasama Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (Pengembangan dan Pengelolaan Kerjasama Dalam dan/atau Luar Negeri)	13,010,000	1,991,000	15%

	11	Persentase dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya BRPSDI (%)	Sub Bagian Umum, Sub Koordinator TO, Sub Koordinator PT, Sub Koordinator Kepegawaian	100	100	Layanan Umum - Pelayanan Teknis dan jasa riset Perikanan Layanan Hubungan Masyarakat - Pelayanan Kehumasan Riset Perikanan - Pelayanan Perpustakaan dan Diseminasi Riset Perikanan	67,749,000	5,028,000	7%
--	----	--	--	-----	-----	--	------------	-----------	----

Secara umum Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan merupakan Indikator Kinerja Manajerial (IKM). Dari 11 IKM yang disepakati, IK yang dapat diukur pada periode triwulan I yakni 4 (empat) IKM. Hasil validasi yang telah dilakukan, keempat IKM tersebut telah memenuhi target periodik yang telah disepakati dalam dokumen Rencana Aksi. Adapun IKK tersebut, antara lain:

- I. IKM Nilai PNBPN BRPSDI (Rupiah Miliar), memiliki target Tahunan 0,021 Miliar, target di periode triwulan I yakni 0,002 miliar. Nilai capaian PNBPN per triwulan I yakni 0,002 miliar;
- II. IKM Persentase unit kerja BRPSDI yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%), memiliki target 100, dan sudah tercapai dengan nilai capaian 100%;
- III. IKM Presentase rekomendasi hasil pengawasan BRPSDI yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%), memiliki target 75% setiap triwulannya, dan sudah tercapai dengan nilai 100%;
- IV. IKM Presentase dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya BRPSDI (%), memiliki target 100%, dan sudah tercapai dengan nilai 100%.

Dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran terdapat beberapa tantangan dan kendala yang harus diselesaikan oleh BRPSDI. Permasalahan dan tantangan yang muncul sering kali menjadi faktor penghambatan pencapaian output kegiatan. Selama tahun 2023, tantangan dan kendala yang dihadapi BRPSDI diantaranya:

1. Pembatasan jenis layanan publik dan produk layanan publik (KepmenKP Nomor 54 Tahun 2022) terutama yang berkaitan dengan Jasa analisa laboratorium yang selama ini menjadi sumber pendapatan utama BRPSDI;
2. Keterbatasan aset yang dapat dikelola/manfaatkan untuk kerjasama pemanfaatan aset;
3. Penurunan jumlah SDM BRPSDI yang sangat signifikan.

Berdasarkan Hasil identifikasi tantangan dan kendala tersebut, Kepala Balai, Kasubbag Umum, Koordinator Keuangan, Kepegawaian, Tata Operasional dan Pelayanan Teknis melakukan pertemuan internal guna melakukan beberapa upaya pengendalian dan langkah strategis agar output kegiatan tetap dapat tercapai. Adapun Rekomendasi yang telah ditetapkan oleh Pimpinan diantaranya:

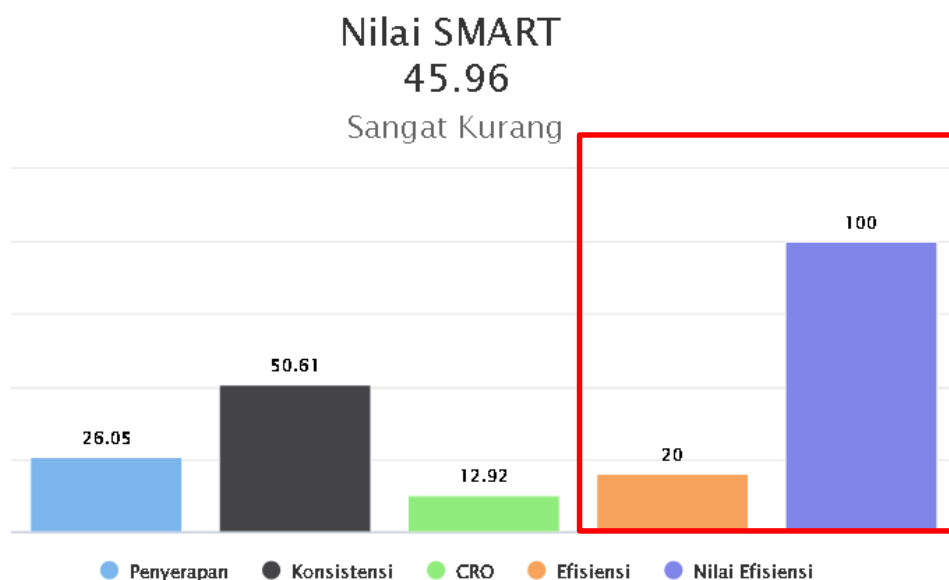
1. Melakukan koordinasi dengan Pusat Riset Perikanan untuk mencari alternatif skema penerimaan PNBPN melalui jenis layanan publik lain;
2. Berkonsultasi dengan KPKNL Kab. Purwakarta untuk membantu mengidentifikasi peluang-peluang aset BRPSDI yang dapat dimanfaatkan/disewakan/pinjam pakai/KSP/BGS sesuai dengan PMK 115 Tahun 2020;
3. Mengusulkan penambahan SDM untuk CPNS, P3K atau melalui mekanisme *outsourcing*.

3.4 EFISIENSI SUMBER DAYA

Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan sebagai organisasi sektor publik dituntut untuk memperhatikan *value for money* dalam menjalankan aktivitasnya. Tujuan yang dikehendaki masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai

pelaksanaan yaitu ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif dalam arti mencapai tujuan dan sasaran (*maximizing benefits and minimizing costs*), serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran.

Pencapaian kinerja Anggaran BRPSDI dihitung menggunakan aplikasi SMART DJA Kementerian Keuangan Tahun 2023. Namun aplikasi tersebut belum dapat digunakan untuk mengukur capaian kinerja anggaran pada periode triwulan I. Adapun analisa efisiensi sumber daya berdasarkan indikator kinerja dalam dokumen PK diuraikan sebagai berikut:



Gambar 10. Nilai Efisiensi BRPSDI pada aplikasi SMART DJA Kemenkeu per 11 April 2023 (sumber: <https://monev.kemenkeu.go.id/>).

Nilai efisiensi anggaran BRPSDI memperoleh skor 100. Pencapaian nilai efisiensi sebesar 100 % menunjukkan bahwa di dalam pelaksanaan anggaran pada triwulan I 2023, tingkat efisiensi baik efisiensi keluaran maupun efisiensi kegiatan pada level yang sangat baik. Hal ini karena nilai efisiensi dihitung dari perolehan efisiensi. Dimana rentang efisiensi dari -20 sampai +20.

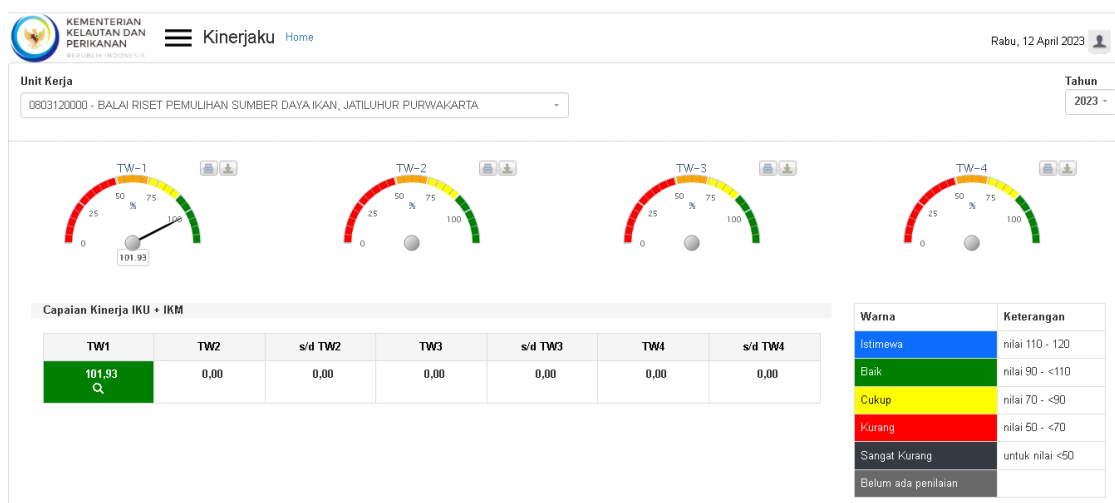
Berdasarkan data pada **Gambar 10**. Terlihat bahwa perolehan efisiensi BRPSDI per 10 April 2023 yaitu +20 atau efisiensi positif. Dengan kata lain,

BRPSDI mampu menerapkan dan menginterpretasikan konsep *value for money*. Dimana anggaran yang dikeluarkan sebanding dengan nilai keluaran yang dihasilkan, tentunya sesuai dengan kaidah 3E (Efektif, Efisien dan Ekonomis). Efektif dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan, efisien dalam penggunaan anggaran, dan output yang dihasilkan memiliki nilai ekonomis.

IV. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Tugas dan fungsi BRPSDI dalam mendukung tercapainya IK Pusat Riset Perikanan (Pusriskan) ataupun Badan Riset dan Sumber Daya Manusia (BRSDM KP) dilakukan melalui penyelenggaraan kegiatan yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja (TAPJA). Beberapa Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) telah memenuhi target. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengukuran menggunakan aplikasi eksternal (Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja) atau Kinerjaku (<http://kinerjaku.kkp.go.id/>). Berdasarkan hasil pengukuran Kinerjaku, capaian kinerja triwulan I BRPSDI menunjukkan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar **101,93 %** dengan status Baik (warna hijau).



Secara umum Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan merupakan Indikator Kinerja Manajerial (IKM). Dari 11 IKM yang disepakati, IK yang dapat diukur pada periode triwulan I yakni 4 (empat) IKM. Berdasarkan hasil validasi yang telah dilakukan, keempat IKM tersebut telah memenuhi target periodik yang telah disepakati dalam dokumen Rencana Aksi. Adapun IKK tersebut, antara lain:

- I. IKM Nilai PNBP BRPSDI (Rupiah Miliar), memiliki target Tahunan 0,021 Miliar, target di periode triwulan I yakni 0,002 miliar. Nilai capaian PNBP per triwulan I yakni 0,002 miliar;
- II. IKM Persentase unit kerja BRPSDI yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%), memiliki target 100, dan sudah tercapai dengan nilai capaian 100%;
- III. IKM Presentase rekomendasi hasil pengawasan BRPSDI yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%), memiliki target 75% setiap triwulannya, dan sudah tercapai dengan nilai 75%;
- IV. IKM Presentase dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya BRPSDI (%), memiliki target 100%, dan sudah tercapai dengan nilai 100%.

4.2 Permasalahan, Rekomendasi dan Tindak lanjut

Pelaksanaan kegiatan BRPSDI dalam memenuhi atau mencapai target tidak selalu berjalan dengan lancar, dalam prakteknya ditemukan beberapa kendala maupun masalah baik teknis maupun non teknis. Secara umum kendala-kendala tersebut sudah berhasil diatasi. Berikut merupakan permasalahan yang muncul selama triwulan I Tahun 2023:

Kategori	Permasalahan atau Hambatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Status
IKK PNBP	<p>Hambatan: adanya pembatasan jenis layanan publik dan produk layanan publik (KepmenKP Nomor 54 Tahun 2022) terutama Jasa analisa sampel laboratorium.</p> <p>Permasalahan: Aset yang bisa dikelola/dimanfaatkan untuk kerjasama pemanfaatan BMN terbatas</p>	Berkordinasi dengan Pusrisan dan KPKNL Kab. Purwakarta untuk mencari alternatif skema pemanfaatan BMN BRPSDI dan optimalisasi penarikan PNBP	BRPSDI telah berkonsultasi dengan KPKNL Kab. Purwakarta pada Tanggal 15 Februari 2023 untuk mendapatkan saran dan rekomendasi terkait pola/mechanisme pemanfaatan aset BMN yang dapat dijadikan sebagai sumber penerimaan negara dari pemanfaatan BMN, BRPSDI juga telah bersurat secara resmi ke KPKNL Kab. Purwakarta untuk asistensi penaksiran besaran tarif sewa alat yang dikelola oleh BRPSDI	BRPSDI masih menunggu hasil penaksiran tarif sewa alat dari KPKNL Kab. Purwakarta.

Kinerjaku	Permasalahan: Aplikasi Kinerjaku tidak dapat mengakomodir nilai/angka desimal sesuai dengan kondisi <i>real</i> di BRPSDI. Seperti pada kasus IKK Nilai PNBK BRPSDI, target dan capaian antara dokumen PK dan data dukung capaian kinerja IKK tersebut tidak sesuai atau berbeda	Konsultasikan kendala teknis tersebut kepada pihak Pusrisikan ataupun BRSDM KP	BRPSDI sudah berkonsultasi dengan Pusrisikan dan BRSDM KP terkait dengan masalah tersebut, alternatif solusi sementara yang disampaikan oleh BRSDM KP ialah dilakukan pembulatan angka, agar target dan capaian tersebut dapat tetap diukur sesuai perodesasi waktu pengukuran	BRPSDI masih menunggu hasil koordinasi BRSDM KP dengan pihak pengembang aplikasi
SDM	Hambatan: Penurunan jumlah SDM yang sangat signifikan pasca kebijakan peralihan jabatan fungsional Peneliti dan Teknisi litkayasa menjadi Penyuluh Perikanan menjadi hambatan pencapaian kinerja, dan penyelesaian kegiatan	Mengusulkan penambahan SDM untuk CPNS, P3K atau melalui mekanisme <i>outsourcing</i>	BRPSDI telah melakukan <i>recruitment</i> pegawai melalui mekanisme <i>outsourcing</i> sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Sudah ditindaklanjuti

4.3 Saran

Diharapkan setiap usulan, masukan ataupun rekomendasi yang disampaikan oleh satker terutama terkait dengan usulan kebutuhan SDM kepada Unit Atasan baik Eselon II (Pusat) maupun Eselon I (BRSDM KP) dapat ditindaklanjuti dengan serius dan direspon segera, karena urgensinya cukup vital guna mendukung pelaksanaan program dan kegiatan, terutama hal-hal yang berkaitan dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).

LAMPIRAN

Lampiran I. SK Tim Penyusun LKJ



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN
JALAN CILAWATI NO 1 JATILUHUR, PURWAKARTA, JAWA BARAT
LAMAN <http://brpsdi.kemari.go.id> . SURAT ELEKTRONIK brpsdi@kemari.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN
NOMOR KEP. 23 /BRSDM-BRPSDVOT.210/V/2023

TENTANG
TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA
TAHUN 2022 DAN TRIWULAN TAHUN 2023
BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN,

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja dan institusi pemerintah (SAKIP) dalam rangka tata pemerintahan yang baik sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara maka perlu adanya Laporan Kinerja (LKj);
 - Bahwa untuk mendukung SAKIP tersebut maka perlu ditugaskan Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj) di Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan (BRPSDI) Tahun 2023.
- Mengingat :
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 69 Tahun 2021 tentang Penjurangan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan;

7. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Satker Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan Tahun Anggaran 2023;
8. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN TENTANG TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA TAHUN 2022 DAN TRIWULAN TAHUN 2023 BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN.
- KESATU** : Mengangkat Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan sebagai Tim Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022 dan Triwulan Tahun 2023 Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan.
- KEDUA** : Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU,
1. Melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan (BRPSDI) Tahun 2022 dan Triwulan 2023 yang terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris dan Anggota dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
 2. Tim Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) BRPSDI Tahun Anggaran 2023 mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Penanggung Jawab
Memberikan arahan dan bertanggung jawab terhadap kegiatan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022 dan Triwulan Tahun 2023 serta penilaian mandiri SAKIP BRPSDI Tahun Anggaran 2023.
 - b. Ketua
Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022 dan Triwulan 2023 serta penilaian mandiri SAKIP BRPSDI Tahun 2023, sesuai dengan arahan dan kebijakan dari Pembina dan unit kerja di atas BRPSDI.
 - c. Sekretaris
Menyiapkan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022 dan Triwulan Tahun 2023 serta penilaian mandiri SAKIP BRPSDI Tahun Anggaran 2023.
 - d. Anggota
 - 1) Menyiapkan dan mengkoordinasikan bahan dan bukti capaian serta menyusun Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022 dan Triwulan Tahun 2023 dan penilaian mandiri SAKIP BRPSDI Tahun Anggaran 2023.

2) Melakukan pembaruan masukan data serta rekonsiliasi pada sistem aplikasi pengelolaan kinerja yang ada.

e. Kontributor

Membantu penilaian mandiri SAKIP dan pengumpulan bahan dan bukti capaian dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) BRPSDI.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam dktm KEDUA, Tim Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) BRPSDI Tahun 2022 dan Triwulan Tahun 2023 bertanggung jawab kepada Kepala Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan.
- KEEMPAT** : Tim penyusun Laporan Kinerja (LKj) BRPSDI Tahun 2022 dan Triwulan Tahun 2023 mengikuti jadwal dan arahan dari instansi unit kerja eselon di atas BRPSDI terkait penyusunan Laporan Kinerja.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada DIPA Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM** : Keputusan Kepala Balai ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta,
Pada tanggal 2 Januari 2023
Kepala Balai Riset Pemulihan
Sumber Daya Ikan



Ir. Iswan Ratna Astuti
NIP. 19691124 199503 2 001^{4/1}

Lampiran : Keputusan Kepala Balai Riset Pemulihan
Sumber Daya Ikan
Nomor : 23 / BRPSDI-BRP50VOT/210A/2023
Tanggal : 2 Januari 2023

**SUSUNAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA (LKJ) TAHUN 2022 DAN
TRIWULAN TAHUN 2023
BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN**

No.	Nama/NIP	Pangkat & Gol. Ruang	Jabatan	Tugas Tambahan
1	2	3	4	5
1.	Ir. Iwani Ratna Astuli NIP. 19681124 199503 2 001	Pembina / IV.a	Kepala Balai	Penanggung Jawab
2.	Nanang Widamarta, S.Pi NIP. 19800427 200502 1 001	Pembina / IV.a	Kepala Sub Bagian Umum	Ketua
3.	Riwanto, S.Kel NIP. 19800301 200901 1 005	Penata / III.c	Subkoordinator Kelompok Tata Operasional	Sekretaris
4.	Dwi Cahya Kusuma, S.Si NIP. -	-	Pengelola Program, Monitoring dan Evaluasi	Anggota
5.	Hendra Saepuloh, S.Soc. NIP. -	-	Pengelola Program dan Laporan	Anggota
6.	Tatek Priwanto, S.E NIP. 19860111 200912 1 001	Penata / III.c	Subkoordinator Kelompok Tata Usaha	Kontributor
7.	Dyah Ika Kusumaningtyas, S.Si NIP. 19850123 200901 2 002	Penata Muda / III.b	Subkoordinator Kelompok Pelayanan Teknis	Kontributor

Ditetapkan di Purwakarta,
Pada tanggal 2 Januari 2023
Kepala Balai Riset Pemulihan
Sumber Daya Ikan

Ir. Iwani Ratna Astuli
NIP. 19681124 199503 2 001

Lampiran II. Dokumen PK BRPSDI Tahun 2023



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 18
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMAH www.kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Iswari Ratna Astuti

Jabatan : Kepala Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan

Selanjutnya disebut pihak kesatu

Nama : Yayan Hikmayani

Jabatan : Kepala Pusat Riset Perikanan

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 10 Januari 2023

Pihak Kedua
Kepala Pusat Riset Perikanan



Yayan Hikmayani

Pihak Kesatu
Kepala Balai Riset Pemulihan
Sumber Daya Ikan



Iswari Ratna Astuti

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1. Terpenuhi Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Sakker	1. Nilai PNBK BRPSDI (Rupiah Miliar)	0,021
	2. Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK BRPSDI dibandingkan Realisasi Anggaran BRPSDI 2022 (%)	≤0,5
	3. Indeks Profesionalitas ASN BRPSDI (Indeks)	80
	4. Nilai PM SAKIP BRPSDI (Nilai)	78
	5. Nilai Rekonsiliasi Kinerja BRPSDI (Nilai)	92
	6. Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar BRPSDI (%)	92
	7. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan BRPSDI yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	75
	8. Nilai IKPA BRPSDI (nilai)	89
	9. Nilai Kinerja Anggaran BRPSDI (nilai)	82
	10. Kemitraan yang disepakati dan/atau diindikasikan/ lanjut lingkup BRPSDI (Kemitraan)	2
	11. Persentase dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya BRPSDI (%)	100

Data Anggaran

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	7.342.015.000
Total Anggaran Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan Tahun 2023		7.342.015.000

Jakarta, 10 Januari 2023

Pihak Kedua
Kepala Pusat Riset Perikanan


Yayan Hilumayani

Pihak Kesatu
Kepala Balai Riset Pemulihan
Sumber Daya Ikan


Iswari Ratna Astuti